

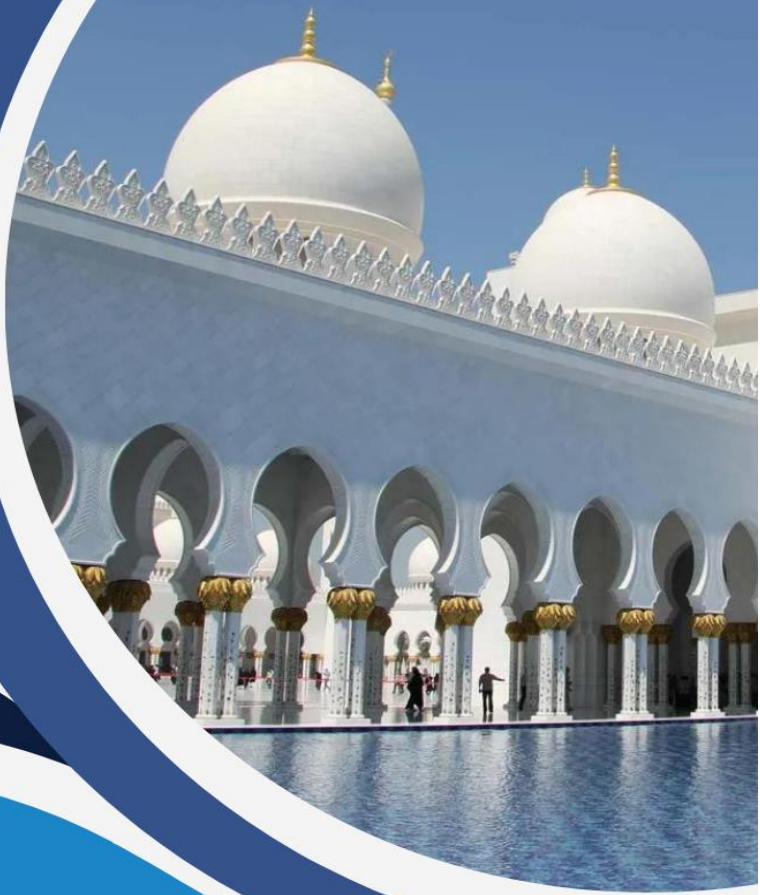


KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT WILAYAH III

2023



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Wilayah III merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023. LKj ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas dalam pencapaian target kinerja dan anggaran sesuai dengan Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan ini mengacu kepada Permenlu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Wilayah III merupakan unsur pelaksana pengawasan intern meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal. Inspektorat Wilayah III terus berusaha meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah III sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020 – 2024.

Kinerja Inspektorat Wilayah III diukur berdasarkan tiga perspektif, yaitu *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Terdapat empat sasaran strategis yang dalam implementasinya diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis 2020-2024.

Dokumen LKj Inspektorat Wilayah III TA 2023 menyajikan fakta-fakta pencapaian kinerja (*performance result*) dikaitkan dengan perencanaan kinerja (*performance plan*) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2023. Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Wilayah III ini juga menjelaskan data dan informasi serta capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III.

LKj juga dilengkapi dengan narasi keberhasilan yang diraih, perubahan positif yang berhasil diwujudkan, inovasi/terobosan, kendala, proyeksi, solusi ke depan dalam rangka memberikan gambaran dan pemahaman kepada publik mengenai tugas, fungsi, persoalan yang dihadapi dan strategi untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik sesuai tuntutan reformasi birokrasi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran Inspektorat Wilayah III dan pemangku kepentingan atas kerja sama yang terjalin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Inspektorat Wilayah III. Kami mengharapkan LKj Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 17 Januari 2024

Inspektur Wilayah III

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lanang Seputro', written over a horizontal line.

Lanang Seputro

NIP. 19680107 199303 1 011

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA TA 2023

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv



III. Akuntabilitas Kinerja TA 2023	9
III.1 Capaian Kinerja	9
III.1.1 Customer Perspective	13
III.1.2 Internal Business Process Perspective	21
III.1.3 Learning & Growth Perspective	44
IV. Penutup	49



I. Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.1.1 Tugas dan Fungsi	1
I.1.2 Struktur Organisasi	2
I.2 Aspek Strategis	3
I.2.1 Potensi/Peran Strategis	4
I.2.2 Permasalahan Utama	4
II. Perencanaan Kinerja	6
II.1 Rencana Strategis	6
II.2 Perjanjian Kinerja	7



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Wilayah III merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Wilayah III dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia, LKj juga merupakan wujud dari capaian kinerja Inspektorat Wilayah III dalam mencapai visi dan misinya, sebagaimana termuat dalam Peta Strategi Inspektorat Wilayah III Tahun 2023.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Inspektorat Wilayah III telah menetapkan visi “Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan secara independen, objektif, profesional, berintegritas, dan akuntabel pada Wilayah Kerja III guna mendukung keberhasilan diplomasi untuk kepentingan rakyat”. Dalam pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dapat mendorong pencapaian diplomasi total;
2. Meningkatkan peran Itjen sebagai Konsultan, Pencegahan Dini, Manajemen Resiko, Penjamin Kualitas guna meningkatkan kualitas kerja, anggaran, dan Barang Milik Negara;
3. Mendorong terciptanya Aparatur Kemlu yang profesional, integritas, disiplin, jujur dan akuntabel; serta
4. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang handal.

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Inspektorat Wilayah III TA 2023 sebesar 107,41% Berikut perbandingan NCKO selama periode Renstra 2020-2024 :

	2020	2021	2022	2023
Nilai Capaian Kinerja Organisasi	107,86	102,45%	104,50 %	107,41%

Capaian Kinerja per Pespektif Inspektorat Wilayah III TA 2023, sebagai berikut :

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
<i>Customer Perspective</i>	20%	112,33
<i>Internal Business Process Perspective</i>	40%	112,49
<i>Learning and Growth Perspective</i>	40%	99,87
Total NCKO	107,41	

Capaian IKU berbasis *Balanced Scorecard* Inspektorat Wilayah III TA 2023 masing-masing sebagai berikut:

1. Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah III sebesar 3,37 dari skala 4.
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III sebesar 120%.
3. Persentase rekomendasi hasil verifikasi/reviu dokumen keuangan yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III sebesar 100%.
4. Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III sebesar 100,71%.
5. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III sebesar 114,29%.
6. Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III tahun 2022 sebesar 79,40 (BB) dari target sebesar 79,50 (BB).

Berdasarkan Realisasi Renaksi TA 2023, Inspektorat Wilayah III telah melaksanakan program kegiatan untuk mencapai 4 sasaran strategis. Adapun kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan pada Tahun 2023 antara lain pelaksanaan audit, reviu Laporan Keuangan, reviu Penilaian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA- K/L), reviu LKj, reviu Revisi Anggaran, reviu PNPB, verifikasi Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA), Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti pendampingan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), permintaan keterangan/klarifikasi hasil audit, peningkatan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengawasan Pengadaan PPPK, dan Telaah Sejawat Internal (TSI). Selain itu, Inspektorat Jenderal juga melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait sebagai bagian dari upaya penyelesaian tindak lanjut hasil audit, baik yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal maupun Aparat Pengawas Eksternal.

Dalam mencapai kinerja tersebut, Inspektorat Wilayah III masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang disebabkan antara lain keterbatasan anggaran, jumlah SDM (Auditor) yang terbatas sementara beban pekerjaan meningkat dengan tuntutan target



kinerja yang lebih baik, pelaksanaan kegiatan bersamaan waktunya dengan kegiatan lain, dan lambatnya satker dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Wilayah III terus melakukan pendekatan secara koordinatif serta mendorong Satker terkait untuk menyelesaikan permasalahan, mengoptimalkan SDM yang ada agar tercapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Guna menunjang pencapaian sasaran tersebut, Inspektorat Wilayah III memperoleh pagu anggaran untuk Program Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan TA 2023 yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Afrika dan Timur Tengah serta satuan kerja Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal, sebesar

Pada TA 2023 dan memperoleh ABT sebesar capaian kinerja Inspektorat Wilayah III mencapai 107,41% dengan serapan anggaran sebesar sehingga realisasi anggaran sebesar 99,99%.

BAB I

PENDAHULUAN



I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, berdasarkan pengukuran kinerja selama tahun anggaran berjalan beserta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LKj disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia.

LKj Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 disusun berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC), yang terdiri dari 3 (tiga) perspektif yaitu *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth* dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama.

I.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Jenderal Kemlu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Permenlu tersebut, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan tugas dan fungsi:

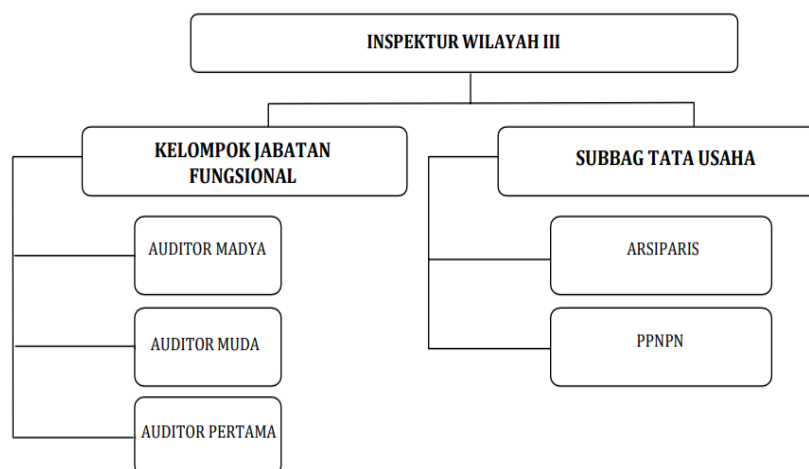
1. Sesuai pasal 576; Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Afrika, Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
2. Sesuai pasal 577; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Afrika, Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
- b. Penyusunan rencana program pengawasan intern pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Afrika, Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Afrika, Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- e. Pelaporan hasil pengawasan;
- f. Pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan layanan manajemen Inspektorat Wilayah III.

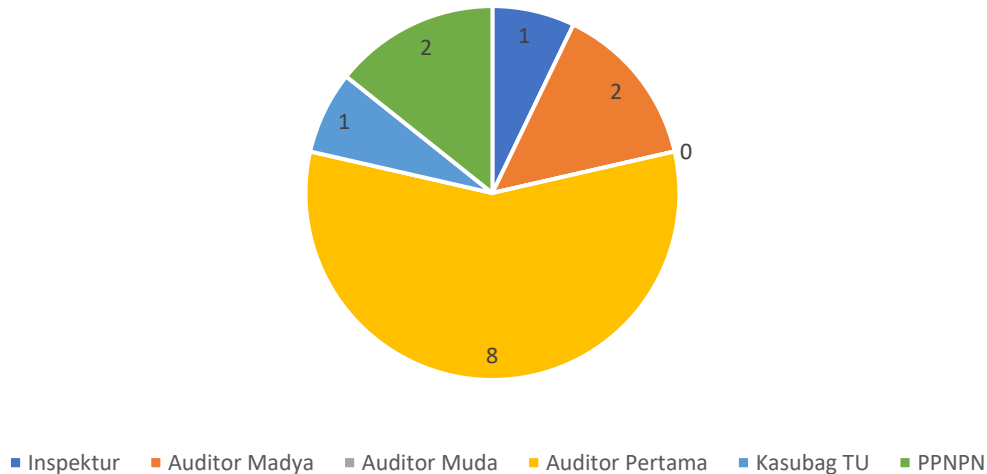
I.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah III didukung oleh 11 (sebelas) orang Auditor yang terdiri dari 3 (tiga) Auditor Madya dan 9 (sembilan) orang Auditor Ahli Pertama, namun terdapat rotasi pegawai 1 (satu) Auditor Pertama ke Inspektorat Wilayah II dan terdapat 1 (satu) Auditor Madya yang bertugas SK 111. Selain itu juga terdapat 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Setiap auditor mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah III sebagai berikut:



Komposisi Inspektorat Wilayah III berdasarkan Kelompok Jabatan



Inspektorat Wilayah III terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Inspektorat Wilayah III selama Tahun 2023 adalah sebanyak 16 (enam belas) orang, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Inspektur Wilayah III;
2. 1 (satu) orang Kasubbag Tata Usaha;
3. 12 (dua belas) Auditor (Madya dan Pertama); dan
4. 2 (dua) orang PPNNP yang difungsikan sebagai Sekretaris dan Pengemudi Inspektur Wilayah III.

Namun demikian, terdapat rotasi pegawai 1 (satu) Auditor Pertama ke Inspektorat Wilayah II dan terdapat 1 (satu) Auditor Madya yang bertugas SK 111. Sehingga untuk komposisi jumlah Auditor tersisa 10 (Sepuluh) Auditor yang terdiri dari 2 (Dua) Auditor Madya dan 8 (Delapan) Auditor Pertama.

I.2 ASPEK STRATEGIS

Pada dasarnya Aspek Strategis Organisasi Inspektorat Wilayah III tidak terlepas dari aspek internal organisasi yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan intern yang dilakukan terhadap seluruh Satuan Kerja (Satker) Kemlu di Pusat dan Perwakilan RI.

Sebagai bagian dari fungsi manajemen organisasi, pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (dalam hal ini Kementerian). Peran penting pengawasan tersebut tercermin dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sesuai Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Dalam rangka memperkuat pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia, Permenlu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, lahir sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan intern meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

I.2.1 POTENSI/PERAN STRATEGIS

Inspektorat Wilayah III turut andil dalam memberikan *early warning* dan deteksi dini terhadap Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III untuk meminimalisir temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari dan berperan dalam meningkatkan kapabilitas pengendalian internal dengan berfungsi sebagai *adviser* atau *strategic consultant* baik kepada Satuan Kerja Pusat maupun Perwakilan yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

I.2.2 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Wilayah III berupaya untuk tetap konsisten melaksanakan kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja dan berusaha mencapai target-target pada masing-masing Indikator Kinerja Utama. Pada awal Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Jenderal telah melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Penyusunan PKPT Berbasis Risiko yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal pada tanggal 12-15 Oktober 2022 di Yogyakarta dan Nota Dinas Nomor 00642/PW.01/2023/69 tentang Usulan Perubahan Objek PKPT TA 2023 pada tanggal 6 Januari 2023.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Wilayah III melaksanakan kegiatan pengawasan berupa audit pada Satker Eselon II di Dalam Negeri dan Satker Perwakilan, meliputi:

1. KBRI Abu Dhabi;
2. KJRI Dubai;
3. Biro SDM; dan

4. Biro Keuangan.

Disamping kegiatan pengawasan melalui kegiatan audit tersebut di atas, Inspektorat Wilayah III juga melakukan kegiatan pengawasan melalui Reviu Laporan Keuangan (LK), Reviu Penilaian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA- K/L), Reviu LKj, Reviu Revisi Anggaran, Reviu PNPB, Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ), Reviu Anggaran Belanja Tambahan (ABT), Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi APIP dan BPK, Verifikasi Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA), Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti pendampingan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja (Satker), permintaan keterangan/klarifikasi hasil audit, peningkatan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengawasan Pengadaan PPPK, Telaah Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK), dan Telaah Sejawat Internal (TSI).

Permasalahan utama dari Inspektorat Wilayah III adalah minimnya anggaran dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) karena alokasi anggaran yang sudah ditentukan selama tiga tahun kebelakang ini setelah masa *Post Covid-19* masih sangat terbatas dan belum seperti pengalokasian anggaran pada masa sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dimana Inspektorat Wilayah III menerima alokasi anggaran hingga diatas Rp2 Miliar pada saat itu. Sehingga hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi proses pengawasan intern di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Afrika, Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Sementara itu jumlah auditor di Inspektorat Wilayah III masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan *bezetting* yang telah ditentukan, tentunya hal tersebut mempengaruhi kinerja dari auditor dikarenakan jumlah maupun komposisi auditor yang sangat tidak relevan dengan tuntutan organisasi yang semakin berkembang setiap tahunnya.

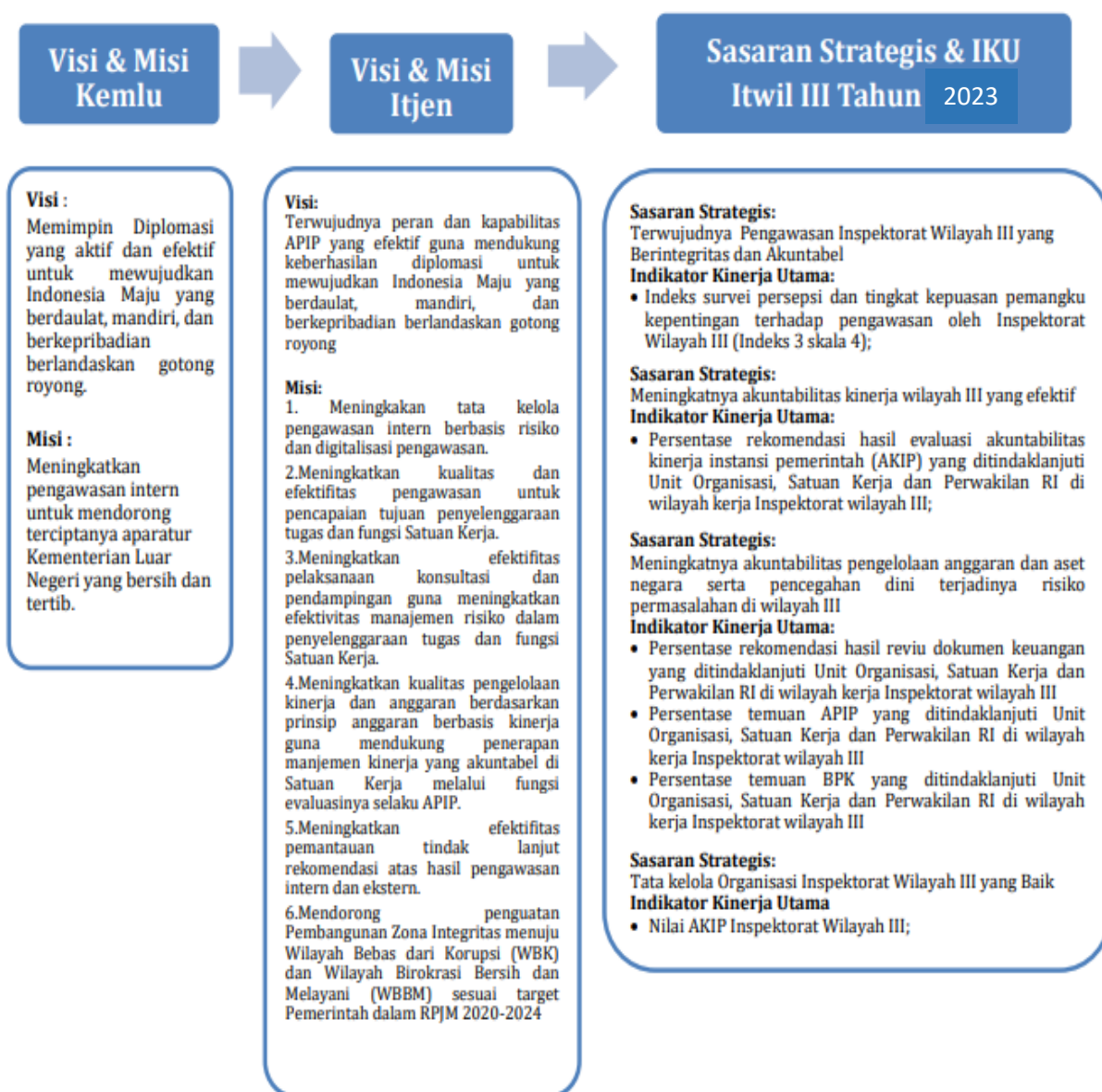
BAB II

PERENCANAAN KINERJA



II.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

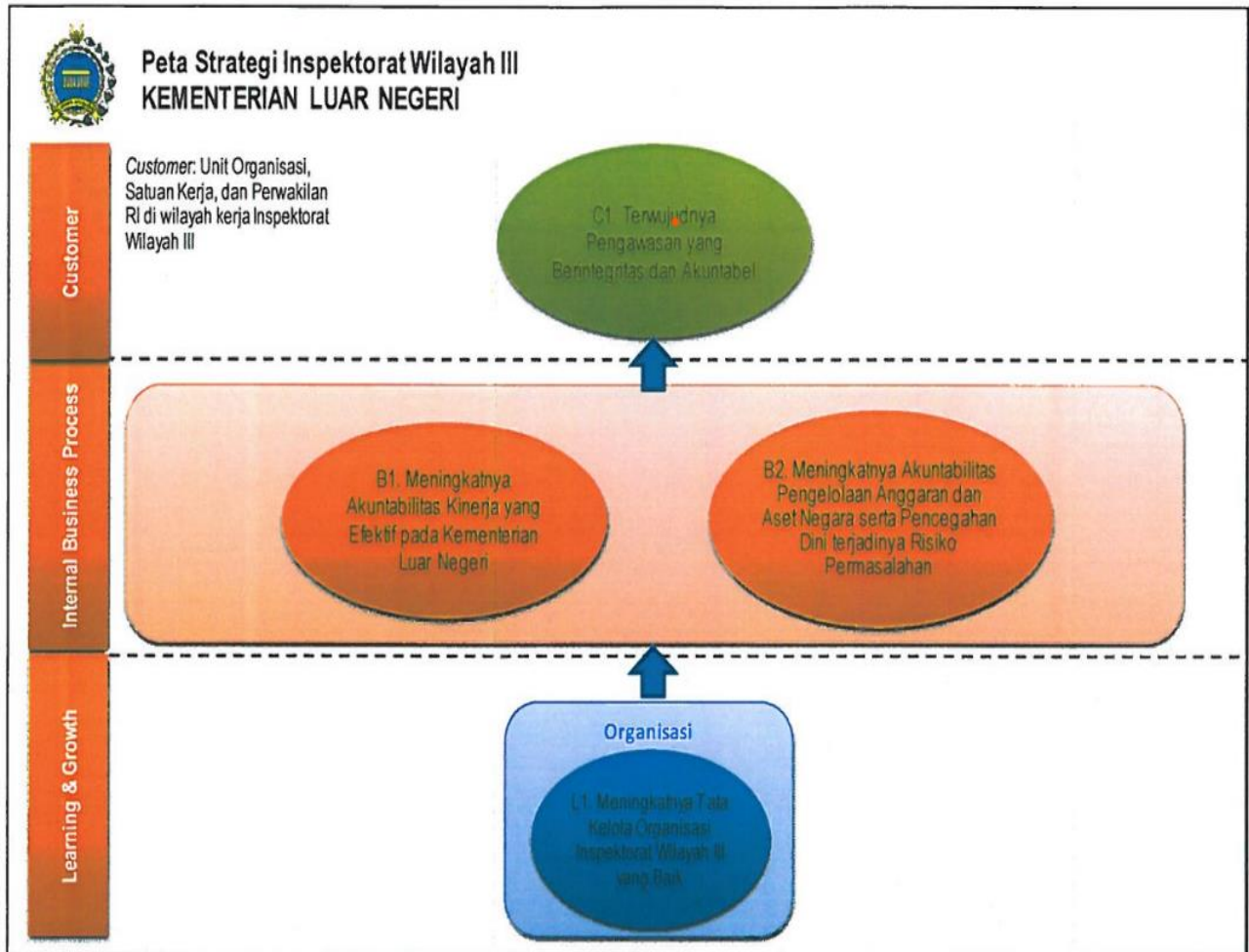
Inspektorat Wilayah III telah menyusun dokumen perencanaan Rencana Strategis 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU, yang dilengkapi dengan penjelasan dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.



II.2 PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT WILAYAH III

TAHUN ANGGARAN : 2023



Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Customer Perspective				
C1	Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	C1.1	Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah III	3 (skala 4)
Internal Business Process Perspective				
B1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri	B1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	68%
Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan	B2.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidi dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	100%
		B2.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	95,50%
		B2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	87,50%
Learning & Growth Perspective				
L1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah III yang Baik	L1.1	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III	79,5 (BB)

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	
Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah III 2023		

Alokasi Anggaran Inspektorat Wilayah III memperoleh pagu anggaran sebesar untuk Program Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Afrika dan Timur Tengah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



III.1 CAPAIAN KINERJA

Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Inspektorat wilayah III telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian meliputi: Kegiatan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern.

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah III diukur dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap *perspective*. Dari perhitungan tersebut, capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2023 adalah sebesar 107,41. Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja masing-masing *perspective* berdasarkan bobotnya pada aplikasi AKSI yang merupakan akumulasi perhitungan capaian program kegiatan dari 3 *perspective* dengan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja per Perspektif

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
<i>Customer Perspective</i>	20%	112,33
<i>Internal Business Process Perspective</i>	40%	112,49
<i>Learning and Growth Perspective</i>	40%	99,87
Total NCKO	107,41	

Capaian kinerja per IKU sesuai Perjanjian Kinerja :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja per IKU

IKU	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
C1.1 Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah III	3 (skala 4)	3,37	112,33%	Telah melebihi target yang telah ditentukan
B1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada wilayah	68%	82,80%	120%	Telah melebihi target yang telah ditentukan

kerja Inspektorat Wilayah III				
B2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	100%	100%	100%	Telah mencapai target yang telah ditentukan
B2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	95,50%	96,18%	100,71%	Telah melebihi target yang telah ditentukan
B2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	87,50%	100%	114,29%	Telah melebihi target yang telah ditentukan
L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III	79,5 (BB)	79,4 (BB)	99,87%	Belum mencapai target yang telah ditentukan

Inspektorat Wilayah III telah berhasil mencapai target pengawasan sesuai yang direncanakan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Meskipun capaian kinerja secara umum di atas 100%, namun dalam tahun berjalan masih terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan dan belum menunjang pencapaian. Dari 6 (enam) IKU tersebut, hanya 1 (satu) IKU yang belum tercapai sesuai target yang telah ditentukan yaitu IKU L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III, sehingga diperlukan peningkatan dalam penyusunan dokumen AKIP (PK, Manual IKU, dan LKj) kedepannya.

Beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Wilayah III, antara lain:

1. Perlunya perumusan kembali kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pada indeks survey persepsi dan jasa yang diberikan APIP kepada satuan kerja berupa *quality assurance* dan *consultant* serta perlu merinci kegiatan pendukung dan mengevaluasi kegiatan tersebut secara berkala;
2. Tuntutan organisasi mengenai pengembangan kemampuan, kompetensi dan kapabilitas auditor atas perubahan ketentuan dan peraturan tentang keuangan, barang milik negara, kepegawaian dan perencanaan anggaran yang sangat dinamis;
3. Waktu pelaksanaan kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan dan ketentuan saling bersamaan dan berbenturan dengan kegiatan lain; dan

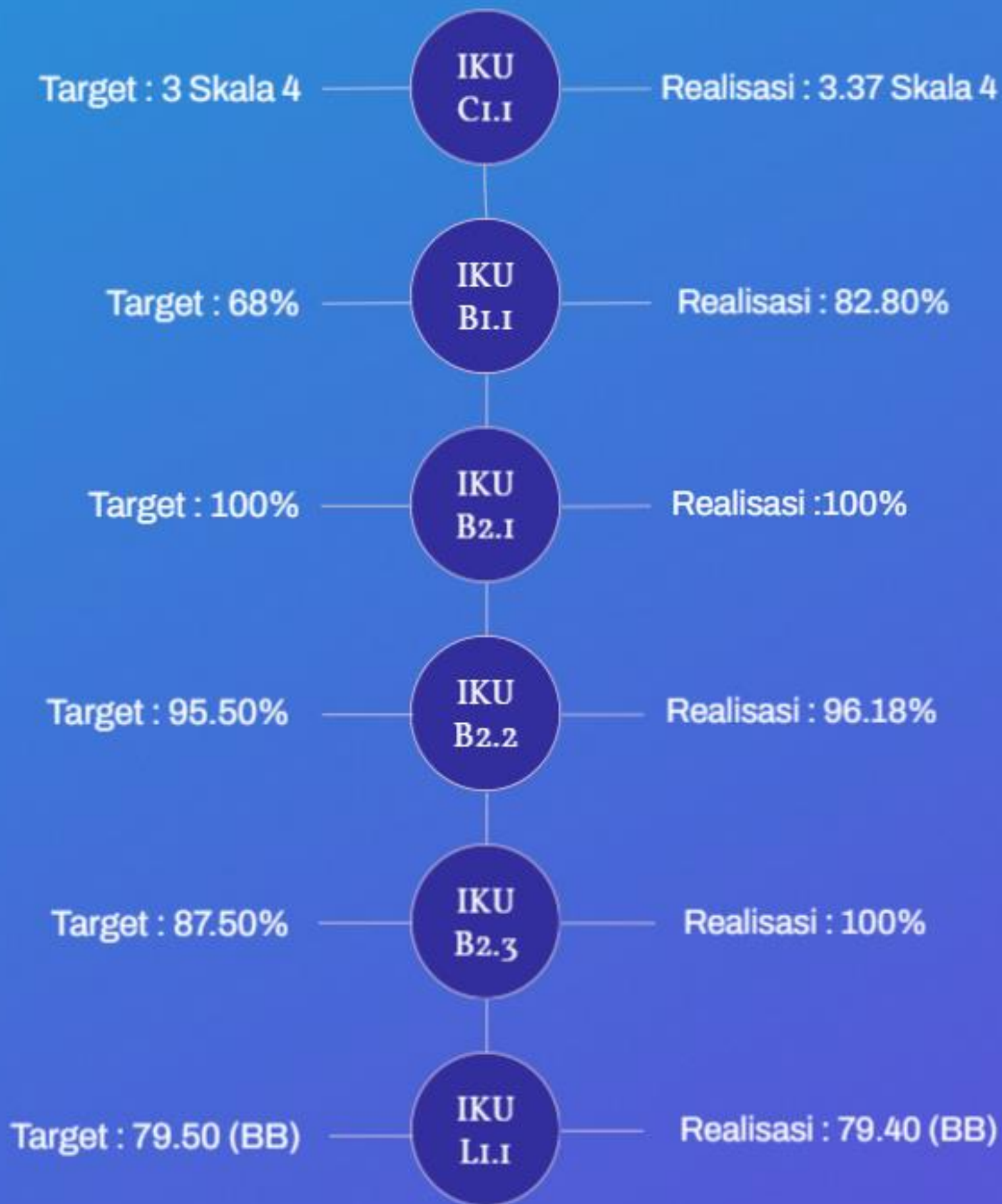
4. Beberapa kegiatan dalam hal penentuan waktu dan jenis kegiatan (luar/dalam kota) bergantung pada Satker lain yaitu Bimtek Penyusunan RKA KL, Reviu Rencana Kebutuhan BMN dan Laporan Keuangan.

Dalam menyikapi faktor-faktor eksternal dan internal tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Penyusunan kalender kegiatan dengan terlebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian target dan juga menunjuk penanggungjawab (PIC) kegiatan serta melakukan pemantauan secara berkala;
2. *Sharing knowledge* dalam bentuk pelatihan kantor sendiri/bimtek mandiri. Diharapkan *sharing knowledge* ini dapat diinternalisasi sehingga menjadi budaya. Perlu juga mempertimbangkan untuk membentuk mekanisme pengendalian mutu berupa paparan program kerja audit (PKA) antar wilayah dengan pengendali teknis sebagai koordinator;
3. Membentuk kelompok kerja/tim pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan komposisi auditor dari sisi kompetensi dan jenjang auditor serta perlu mempertimbangkan skala prioritas kegiatan dan juga menyusun mekanisme atau pemilihan tahapan kegiatan yang tepat dengan mempertimbangkan kualitas hasil kegiatan dan sumber daya yang dimiliki;
4. Melakukan koordinasi awal penyusunan kegiatan dan merencanakan waktu kegiatan berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya; dan
5. Menyiapkan tim audit sesuai kalender kegiatan yang disusun.

Pada DIPA Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Wilayah III memperoleh pagu anggaran sebesar _____ dan memperoleh ABT sebesar _____ dengan capaian realisasi anggaran sebesar _____ atau telah tercapai sebesar 99,99%.

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III



III.1.1 Customer Perspective

C1 Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel

Deskripsi Sasaran Strategis C1

Berdasarkan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021, Inspektorat Jenderal memiliki fungsi dan tugas dalam pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI terhadap anggaran berbasis kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut.

Berintegritas adalah konsistensi dalam nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran Strategis (SS) C1 diukur berdasarkan capaian pada 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah III.

C1 Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Internal Inspektorat Wilayah III yang Berintegritas dan Akuntabel diukur melalui IKU C1.1

C1.1 Indeks survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah III

Deskripsi IKU C1.1 :

Indeks Survei Persepsi Pemangku Kepentingan adalah ukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan yang menggambarkan kondisi penerimaan pelayanan pengawasan berupa: audit dalam negeri dan audit luar negeri, serta pendampingan pada Satker Pusat dan Perwakilan RI. Hasil Survey diperoleh pada Triwulan ke – 4.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut.

Objek Pemeriksaan (OP) terdiri dari:

Pimpinan Kementerian Luar Negeri adalah Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Pusat.

Mitra Pengawasan adalah pejabat unit Eselon II dan/atau Eselon III serta Perwakilan RI.

Klien Pengawasan adalah unit organisasi dan satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang menjadi auditi Inspektorat Jenderal.

Indeks Kepuasan adalah ukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan yang menggambarkan kondisi penerimaan pelayanan pengawasan berupa: audit dalam negeri dan audit luar negeri serta pendampingan pada Satker Pusat dan Perwakilan RI (Perirjen No. 02607/PW/12/2017/11 tgl. 29 Desember 2017).

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut.

Skala indeksasi:

1 = nilai 0-30; kategori Buruk

2= nilai 31-60; kategori: Cukup Baik

3= nilai 61-80; kategori: Baik

4= nilai 81-100; kategori: Sangat Baik

Tujuan

Mengukur sejauh mana tingkat kepuasan Satker Pusat dan Perwakilan Kemenlu terhadap pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III. Audit kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan (Permenlu No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Kemenlu dan Perwakilan RI). Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang menjadi objek audit oleh Inspektorat Wilayah III disebut Auditi.

Guna mencapai tujuan tersebut. Inspektorat Wilayah III menyusun rencana aksi pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Audit Kinerja pada unit organisasi dan satuan kerja di dalam negeri (Biro Keuangan dan Biro SDM).
- b. Audit Kinerja pada unit organisasi dan satuan kerja di luar negeri (Abu Dhabi dan Dubai).

Adapun realisasi rencana aksi dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai IKU C1.1 tahun 2023, yaitu :

- a. Audit pada Biro Keuangan dan Biro SDM dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus – 8 September 2023.
- b. Audit pada KBRI Abu Dhabi dilaksanakan pada tanggal 3 – 9 April 2023.
- c. Audit pada KJRI Dubai dilaksanakan pada tanggal 28 Maret – 3 April 2023.

Untuk kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III pada TA 2023, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan:

1. Pendampingan Kegiatan Renovasi Gedung Pancasila;
2. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pola Setor PNPB;
3. Pendampingan Penyusunan Perubahan Permenlu 3/2020 dan Permenlu 07/2006;
4. Pendampingan Kegiatan Persiapan Penyusunan LKj Kemenlu;
5. Pendampingan Pelaksanaan Rekrutmen PPPK;
6. Pendampingan Penyusunan Permenlu Kode Etik UKPBJ;
7. Pendampingan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Perwakilan;
8. Pendampingan Penyusunan LK dan LKj pada Satker Pusat;
9. Pendampingan Penyusunan Rancangan Permenlu dan Kepmenlu Fasilitas Sewa Rumah (FSR);
10. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan pada Satker Pusat;
11. Pendampingan Persiapan Pembukaan KBRI Yaounde;
12. Pendampingan Persiapan Perpindahan Sementara KBRI Khartoum; dan
13. Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Penelaahan Pertanggungjawaban Keuangan pada KBRI Damaskus pada tanggal 28 Oktober-3 November 2023.

Formula Perhitungan:

Rata-rata Indeks Kepuasan terhadap pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III.

Analisis IKU C1.1

Indeks survey persepsi ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dari satuan kerja terhadap jasa yang diberikan oleh Itwil III. Umpan balik ini akan digunakan oleh Pimpinan dalam peningkatan kinerja kedepannya. Sesuai ketentuan dan perundangan APIP memberikan jasa konsultasi (*consultant*) dan jasa penjaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi auditi. Pada tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan survey persepsi berbasis *web*. Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh dari *survey online* dengan perhitungan indeks 3 (skala 4), seperti tergambar dalam tabel capaian di bawah ini:

Informasi Kinerja

Tabel 3.3

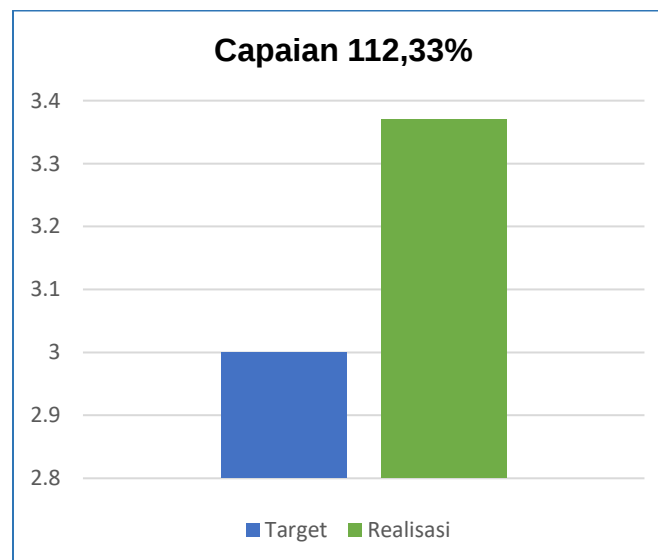
Capaian IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah III

Indeks Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah III	Jumlah Unit/Satker yang mengisi survey Indeks Survei Persepsi dan Tingkat Kepuasan terhadap pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III (berdasarkan Laporan Hasil Survei Persepsi dan Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Itjen TA 2023)	34 (Satker Pusat dan Perwakilan)
Total Realisasi		3,37
Target		Indeks 3 Skala 4
Capaian		112,33%

Sumber : Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Grafik 3.1

Capaian Kinerja Customer Perspective IKU C1.1



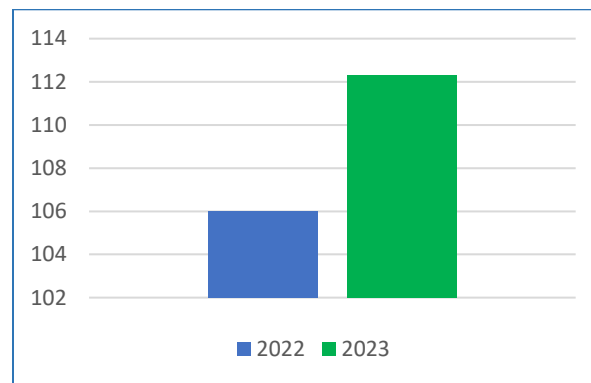
Perbandingan Kinerja

Tabel 3.4 Perbandingan IKU C1.1

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
C1.1	3 skala 4	3,18 skala 4	106%	3 skala 4	3,37 skala 4	112,33%

Grafik 3.2

Perbandingan Capaian IKU C1.1



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah III mengalami peningkatan sebesar 6,33% dari 106% menjadi 112,33%.

Capaian IKU Indeks survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan internal Inspektorat Wilayah III sebesar 112,33% ditandai dengan realisasi 14 Satker yang menyatakan Puas (3,37 Skala 4) atau 112,33% dari target 3 skala 4 atau 100%. Hasil survei tersebut didapat dari Satker terhadap pelaksanaan pengawasan dan pendampingan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III. Capaian atas indeks survei persepsi diukur atas pelaksanaan audit kinerja dan kepatuhan, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Dalam rangka pencapaian IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah III, pelaksanaan kegiatan pengawasan berupa kegiatan audit dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan internal Inspektorat Wilayah III juga dilakukan terhadap kegiatan evaluasi, reviu, dan pendampingan pada Satker Pusat dan Perwakilan RI.

Realisasi IKU C1.1 sebesar 3,37 skala 4 telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 3 skala 4, sehingga mendapatkan capaian sebesar 112,33%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,33% dari 106% menjadi 112,33%. Hal ini disebabkan antara lain:

- a) Seluruh Satker Perwakilan yang dilakukan audit pada tahun 2023 mengisi survei pelaksanaan audit; dan
- b) Seluruh Satker Pusat dan Perwakilan yang telah dilakukan evaluasi, revidi, serta kegiatan pendampingan sudah mengisi survei.

Kendala dan Tantangan

Meskipun capaian IKU C1.1 melebihi target yang ditetapkan, namun dalam pencapaiannya Inspektorat Wilayah III masih mengalami kendala, yaitu:

- a) Sumber Daya Manusia yang terbatas untuk melakukan pendampingan Satker; dan
- b) Kebutuhan peningkatan kapasitas auditor dalam melakukan pendampingan dikarenakan perkembangan peraturan, pelaporan dan yang terkait dengan disiplin ilmu.

Sementara itu tantangan terkait capaian IKU C1.1 adalah :

- a) Hasil survey belum dimanfaatkan secara baik oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja; dan
- b) Pelaksanaan kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan pendampingan Satker sehingga terdapat beberapa kegiatan pendampingan yang tidak dapat dilaksanakan.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah antisipatif agar pencapaian target IKU C1.1 menjadi lebih baik, yaitu:

- a) Menentukan skala prioritas pendampingan Satker yang berdampak besar terhadap pencapaian Tusi Kemenlu; dan
- b) Pelatihan dan Bimtek untuk meningkatkan kapasitas auditor dalam mengikuti perkembangan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dalam rangka mencapai target IKU C1.1 sebesar 3 skala 4, Inspektorat Wilayah III juga membuat program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target IKU C1, yaitu dalam rangka memfasilitasi aspirasi dan penilaian atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal, perlu diselenggarakan survei untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan Inspektorat Jenderal. Namun demikian, Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Pemangku Kepentingan Inspektorat Jenderal dalam Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor 02607/PW/12/2017/11 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Pemangku Kepentingan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oleh Karena itu, Inspektorat Jenderal sudah membuat revisi Pedoman Survei Persepsi dan Tingkat Kepuasan

Pemangku Kepentingan Inspektorat Jenderal (Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 01135/13/PW/11/2020/67/11) yang memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, serta Metodologi Survei yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Proyeksi Kedepan

- a) Mengoptimalkan pelaksanaan survei persepsi dilakukan oleh seluruh Satker Pusat dan Perwakilan yang telah mendapatkan layanan pengawasan oleh Inspektorat Wilayah III;
- b) Meningkatkan kualitas jasa pengawasan yang diberikan oleh setiap Auditor melalui bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan; dan
- c) Mengoptimalkan penugasan auditor dan meningkatkan koordinasi pada Satker terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya.

Dokumentasi

Rincian informasi kinerja untuk capaian kinerja IKU C1.1 adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan Audit Kinerja pada Audit Biro SDM dan Biro Keuangan yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2023 – 8 September 2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara luring yang bertempat di Gedung Arsip Kreo, Tangerang ;



Gambar 3.1 Pelaksanaan Entry Meeting Audit Biro SDM dan Biro Keuangan

- b) Melakukan Audit Kinerja pada KJRI Dubai yang dilaksanakan tanggal 28 Maret – 3 April 2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara luring yang bertempat di KJRI Dubai.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Entry Meeting Audit KJRI Dubai

- c) Melakukan Audit Kinerja pada KBRI Abu Dhabi yang dilaksanakan tanggal 3-9 April 2023. Pelaksanaan audit dilakukan secara luring yang bertempat di KBRI Abu Dhabi.



Gambar 3.3 Pelaksanaan Entry Meeting Audit KBRI Abu Dhabi

- d) Melakukan Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Penelaahan Pertanggungjawaban Keuangan pada KBRI Damaskus pada tanggal 28 Oktober-3 November 2023.



Gambar 3.4 Pelaksanaan Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Penelaahan Pertanggungjawaban Keuangan pada KBRI Damaskus

III.1.2 Internal Business Process Perspective

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri

Deskripsi Sasaran Strategis B1

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Efektif dimaknai dalam menjamin terselenggaranya pelayanan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.

Sasaran Strategis (SS) B1 diukur berdasarkan capaian pada 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU B1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III.

Deskripsi Sasaran Strategis B2

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Pengelolaan anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan.

Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan Pemda.

Sasaran Strategis (SS) B2 diukur berdasarkan capaian pada 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- 1) IKU B2.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III;
- 2) IKU B2.2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III; dan
- 3) IKU B2.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III.

B1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri diukur melalui IKU B1.1

B1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III

Deskripsi IKU B1.1

Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP adalah rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun sebelumnya.

Rekomendasi yang Ditindaklanjuti: adalah pelaksanaan hasil rekomendasi LHE AKIP tahun sebelumnya oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan Perwakilan RI.

Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang menjadi objek audit oleh Inspektorat Wilayah III disebut Audit.

Formula

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam evaluasi AKIP/Jumlah rekomendasi yang diberikan.

Tujuan

Untuk mengukur Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi SAKIP yang baik. Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan 2023, Inspektorat Wilayah III telah melaksanakan Pengawasan untuk kegiatan Audit Kinerja terhadap Satker Pusat dan Perwakilan.

Guna mencapai tujuan Inspektorat Wilayah III menyusun rencana aksi tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Evaluasi AKIP untuk Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI;
2. Reviu laporan kinerja untuk Unit Organisasi, Perwakilan RI dan Kementerian.

Adapun realisasi rencana aksi dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target IKU B1.1 tahun 2023, yaitu :

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP eselon I dan Perwakilan;
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP eselon II; dan
3. Pelaksanaan reviu laporan kinerja tingkat Kementerian.

Analisis Capaian IKU B1.1

Berdasarkan dokumen PK Tahun 2023, target IKU B1.1 adalah 68%. Terjadi peningkatan target pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan tujuan dan fungsi Itjen sebagai APIP agar kedepannya nilai AKIP Kemenlu menjadi lebih baik lagi dimulai dengan melakukan evaluasi AKIP dari tingkat Satuan Kerja setingkat eselon II serta memonitoring proses tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban Itjen.

Dalam pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2023, Inspektorat Wilayah III telah memberikan jumlah total rekomendasi sebanyak 279 rekomendasi yang melingkupi Satker Eselon I, Eselon II dan Perwakilan RI yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Dari total jumlah rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja sebanyak 231 rekomendasi dengan realisasi sebesar 82,80% sehingga memperoleh capaian IKU sebesar 120%.

Informasi Kinerja

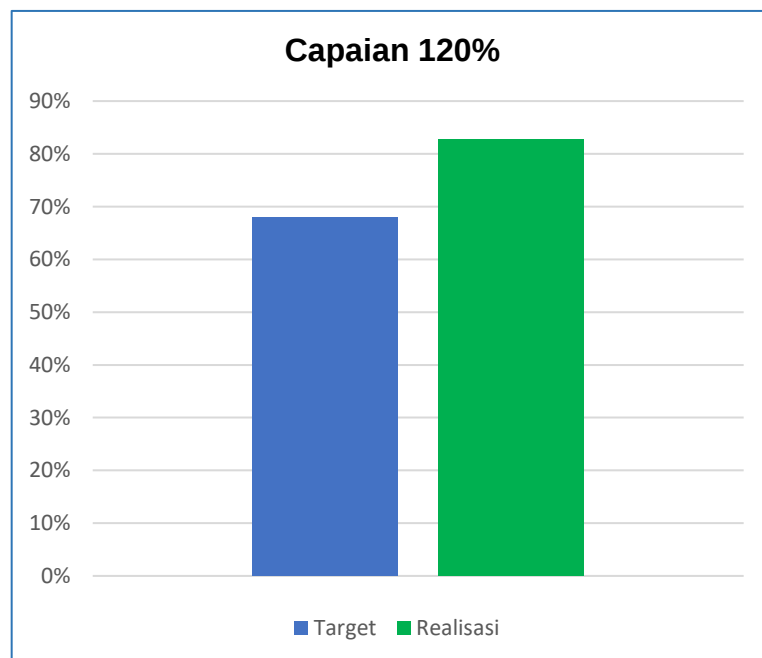
Tabel 3.5

Capaian IKU B1.1 Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

Indeks Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Capaian
Persentase rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Rekomendasi yang ditindaklanjuti (231) / Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP (279)	120%
Total Realisasi		82,80%
Target		68%
Capaian		120%

Sumber : Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Grafik 3.3 Capaian Kinerja *Internal Business Process Perspective* IKU B1.1



Tabel 3.6 Rincian Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP:

NO.	UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA/PERWAKILAN RI	REKOMENDASI LHE AKIP 2023			
		JUMLAH TOTAL	SUDAH DI-TL	PERSENTASE	KODEFIKASI DATA DUKUNG
1.	Setjen	5	5	100%	03450/PR/10/2023/03
2.	Itjen	5	5	100%	46235/PW/10/2023/67
3.	BHAKP	5	5	100%	46691/HK/11/2023/22
4.	BDSP	9	9	100%	46250/PR/10/2023/21
5.	Biro Keuangan	6	6	100%	46444/KU/11/2023/25
6.	BSDM	5	5	100%	46464/PW/11/2023/24
7.	Biro Umum	5	5	100%	46473/PL/11/2023/26
8.	BPO	5	5	100%	44960/OT/10/2023/23
9.	Itwil I	2	2	100%	44051/PW/10/2023/68
10.	Itwil II	5	5	100%	45945/PW/10/2023/69
11.	Itwil III	3	3	100%	54689/PW/12/2023/70
12.	Itwil IV	2	2	100%	51814/PW/12/2023/71
13.	Settjen	1	1	100%	46235/PW/10/2023/67
14.	KBRI Dar Es Salaam	6	6	100%	B-00199/Dar es Salaam/231031
15.	KBRI Windhoek	4	4	100%	B-00299/Windhoek/231101
16.	KJRI Dubai	6	6	100%	B-00246/Dubai/231101
17.	KBRI Pretoria	7	0	0%	Belum mengirimkan TL
18.	KBRI Cairo	6	6	100%	B-00392/Cairo/231128
19.	KJRI Cape Town	6	0	0%	Belum mengirimkan TL
20.	KBRI Antananarivo	12	12	100%	B-00339/Antananarivo/231031
21.	KBRI Rabat	10	10	100%	B-00236/Rabat/231229
22.	KBRI Tehran	4	4	100%	B-00160/Teheran/230807
23.	KBRI Addis Ababa	6	6	100%	B-00225/Addis Ababa/231020
24.	KBRI Beirut	5	5	100%	B-00199/Beirut/230908
25.	KBRI Nairobi	6	5	100%	B-00631/Nairobi/231229
26.	KBRI Manama	3	3	100%	B-00382/Manama/231228
27.	KBRI Doha	13	0	0%	Belum mengirimkan TL
28.	KBRI Ankara	7	7	100%	B-00378/Ankara/231121
29.	KBRI Harare	9	0	0%	Belum mengirimkan TL
30.	KJRI Jeddah	5	5	100%	B-00647/Jeddah/231225
31.	KBRI Damaskus	7	7	100%	B-00241/Damaskus/231103
32.	KBRI Riyadh	8	8	100%	B-00800/Riyadh/231231
33.	KBRI Abuja	6	0	0%	Belum mengirimkan TL
34.	KBRI Amman	6	6	100%	B-00300/Amman/231107
35.	KBRI Khartoum	7	0	0%	Belum mengirimkan TL
36.	KBRI Tunis	6	6	100%	B-00308/Tunis/231229
37.	KBRI Tripoli	7	7	100%	B-00313/Tripoli/231031
38.	KBRI Abu Dhabi	8	8	100%	B-00412/Abu Dhabi/231127
39.	KBRI Baghdad	6	6	100%	B-00236/Baghdad/231230
40.	KBRI Dakar	8	8	100%	B-00154/Dakar/231023
41.	KBRI Muscat	10	10	100%	B-00163/Muscat/231127
42.	KBRI Kuwait City	6	6	100%	B-00291/Kuwait/231105
43.	KJRI Istanbul	9	9	100%	B-00002/Istanbul/240104
44.	KBRI Maputo	6	6	100%	B-00157/Maputo/231107
45.	KBRI Alger	6	6	100%	B-00224/Alger/231126

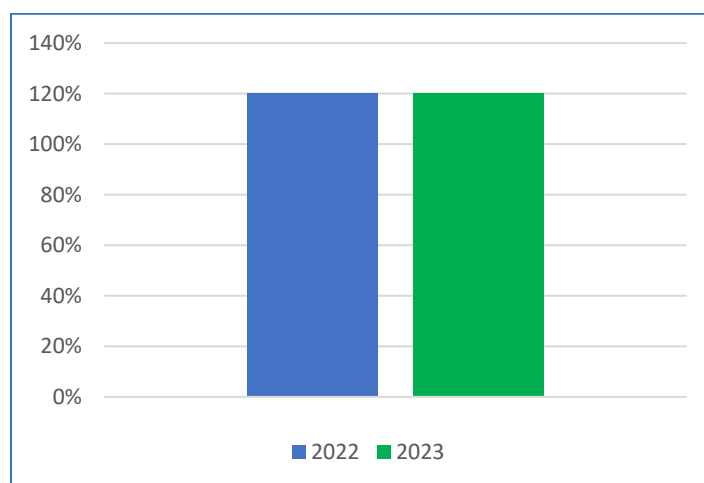
Perbandingan Kinerja

Tabel 3.7 Perbandingan IKU B1.1

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
B1.1	55%	74,35%	120%	68%	82,80%	120%

Grafik 3.4

Perbandingan Capaian IKU B1.1



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKU B1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III tidak mengalami perubahan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu juga masih terdapat 6 (enam) Satker Perwakilan RI yang belum mengirimkan dokumen tindak lanjut ke Inspektorat Wilayah III.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Dalam rangka pencapaian IKU B1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III, telah dilakukan komunikasi baik secara formal maupun informal dengan pihak pemangku kepentingan (Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI) yang dapat mewujudkan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi dalam pencapaian target IKU.

Dengan dilaksanakannya proses komunikasi, hasil evaluasi implementasi SAKIP menjadi lebih akurat, mendorong pemangku kepentingan untuk lebih aktif dalam menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung untuk pelaksanaan penilaian evaluasi SAKIP, serta menindaklanjuti rekomendasi.

Dengan demikian, auditor dapat memberikan hasil penilaian yang lebih akurat dan menyampaikan rekomendasi yang relevan sehingga dapat ditindaklanjuti. Komunikasi yang efektif dengan pihak pemangku kepentingan pun mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu mendukung kecepatan dan ketepatan dalam proses tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.

Realisasi IKU B1.1 sebesar 82,80% telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 68%, sehingga mendapatkan capaian 120%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan, namun terdapat catatan terkait pencapaian IKU B1.1 tersebut, yaitu:

- a) Satker Perwakilan kurang pro-aktif dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP; dan
- b) Belum terdapat Tim Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal yang memonitoring penyampaian tindak lanjut dari Tingkat Eselon I, Eselon II, dan Perwakilan.

Kendala dan Tantangan

Penetapan target sebesar 68% dari jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti telah mempertimbangkan target dan realisasi pada tahun sebelumnya. Beberapa kendala dalam pencapaian IKU B1.1 Inspektorat Wilayah III, yaitu :

- a) Auditor membutuhkan penyesuaian dalam melakukan evaluasi dengan Kertas Kerja LKE menggunakan format yang baru sesuai dengan Permenpan No.88 Tahun 2021;
- b) Pengumpulan data dukung klaim capaian kinerja belum dilakukan secara baik; dan
- c) Jenis rekomendasi evaluasi AKIP bersifat kualitatif sehingga tindak lanjut rekomendasi tidak dapat langsung terlihat.

Sementara itu tantangan terkait capaian IKU B1.1 yaitu pergantian MKO, SMKO, dan MKP yang relatif cepat sehingga kurang maksimal dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah agar pencapaian target IKU B1.1 menjadi lebih baik, yaitu:

- a) Membentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b) Membentuk mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP terhadap laporan hasil evaluasi AKIP.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dalam rangka mencapai target IKU B1.1 sebesar 68%, program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target IKU B1.1, yaitu:

- a) Inspektorat Wilayah III telah mengingatkan MKO, SMKO, dan MKP untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP; dan
- b) Pada saat kegiatan evaluasi, Inspektorat Wilayah III mengingatkan agar penyusunan dokumen AKIP (Renstra, PK, IKU, LKj, dan Renaksi) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proyeksi Kedepan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU B1.1 menjadi lebih baik, yaitu:

- a) Lebih mengintensifkan komunikasi dan koordinasi intensif kepada Unit Organisasi, Satker dan Perwakilan RI untuk memperoleh informasi tindak lanjut dari rekomendasi penilaian AKIP; dan
- b) Inspektorat Jenderal bersama dengan BPO melakukan sosialisasi penyusunan dokumen AKIP.

B2 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan diukur melalui IKU B2.1

B2.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

Deskripsi IKU B2.1

Rekomendasi adalah saran perbaikan oleh Pereviu kepada Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI atas dokumen keuangan sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang diberikan di tahun berjalan atas Laporan Keuangan tahun sebelumnya (untuk LK kementerian hanya diklaim oleh koordinator wilayah); dan
2. Rekomendasi yang diberikan di tahun berjalan atas RKA-K/L tahun berikutnya.

Yang ditindaklanjuti adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III atas rekomendasi yang diberikan.

Guna mencapai tujuan Inspektorat Wilayah III menyusun rencana aksi tahun 2023, sebagai berikut :

1. Reviu Laporan Keuangan Tahun 2022 (Bimtek, *Unaudited*, *Audited*), Semester I 2023, dan Triwulan III 2023;

2. Reviu RKA-K/L;
3. Reviu RKBMN;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Belanja Modal;
5. Reviu Revisi Anggaran;
6. Reviu Revisi RKBMN;
7. Reviu PAPBJ dan P3DN; dan
8. Reviu Hasil Pengawasan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Adapun realisasi rencana aksi dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU B2.1 tahun 2023, yaitu:

1. Pelaksanaan reviu laporan keuangan tahunan tahun 2022;
2. Pelaksanaan reviu laporan keuangan semester I tahun 2023;
3. Pelaksanaan reviu laporan keuangan Triwulan III tahun 2023;
4. Pelaksanaan reviu RKA-K/L tahun 2023;
5. Pelaksanaan reviu RK-BMN tahun 2025;
6. Pelaksanaan Reviu PAPBJ; dan
7. Reviu Hasil Pengawasan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2023.

Formula

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen keuangan/Jumlah rekomendasi yang diberikan. Dalam pelaksanaan reviu dokumen anggaran tahun 2023, Itwil III berhasil melaksanakan reviu dokumen keuangan. Realisasi capaian sebesar 100% dengan capaian kinerja untuk IKU bersangkutan sebesar 100%.

Tujuan

Untuk mengukur efektivitas kualitas rekomendasi Inspektorat Wilayah III atas Laporan Keuangan, RKA-K/L, dan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Unit Organisasi, Satuan Kerja Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III.

Analisis Capaian IKU B2.1

Persentase rekomendasi hasil verifikasi/reviu dokumen kinerja yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III. IKU ini memiliki cakupan hasil kerja yang besar berupa verifikasi/reviu dokumen terhadap 2 (dua) unit Satuan Kerja Eselon I, 11 (sebelas) unit Satuan Kerja Eselon II, dan 32 (tiga puluh dua) unit Satuan Kerja Perwakilan RI. Sementara dengan pertimbangan pelaksanaan kegiatan lain, waktu, sumber daya manusia dan anggaran, Inspektorat Wilayah III melakukan klaim capaian hanya terbatas pada lingkup unit organisasi dan perwakilan RI. Berdasarkan dokumen PK tahun 2023, target IKU B2.1 yaitu 100% tidak mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 3.8

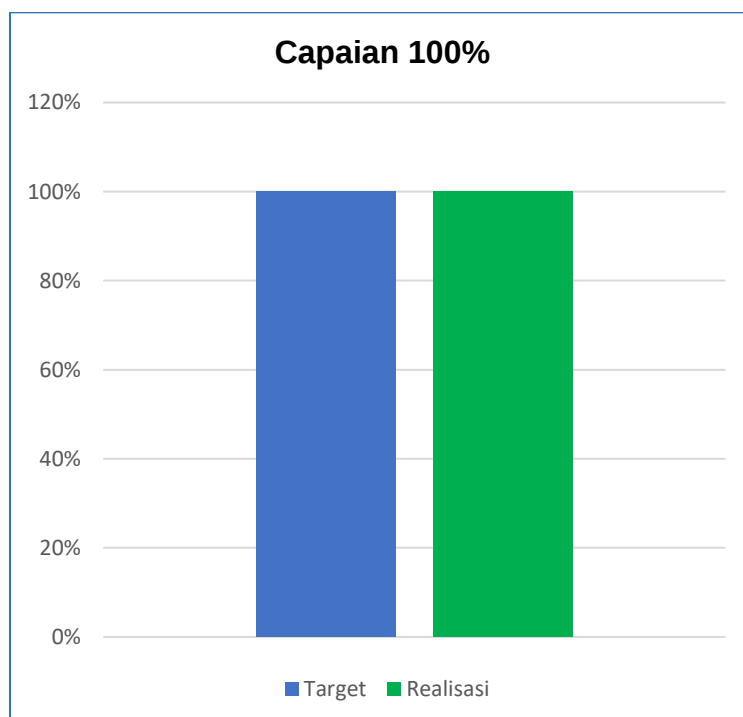
Capaian IKU B2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

Indeks Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Capaian
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen keuangan Revidokumen keuangan Revidokumen LK Smt II 2022, Revidokumen LK Smt I 2023, dan Revidokumen RKA-KL 2024 (491)/Total Rekomendasi yang diberikan (491)	100%
Total Realisasi		100%
Target		100%
Capaian		100%

Sumber : Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Grafik 3.5

Capaian Kinerja Internal Business Process Perspective IKU B2.1



Tabel 3.9 Rincian Realisasi Pelaksanaan Reviu Dokumen Keuangan (Reviu LK Smt II 2022, Reviu LK Smt I 2023, dan Reviu RKA-KL 2024)

NO	UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA/PERWAKILAN RI	REKOMENDASI					
		Reviu LK Semester II 2022	Reviu LK Semester I 2023	Reviu RKA KL 2024	JUMLAH TOTAL	SUDAH DI TL	PERSENTASE
1.	Inspektorat Jenderal	4	5	0	9	9	100%
2.	Sekretariat Jenderal	2	9	0	11	11	100%
3.	KBRI Abu Dhabi	6	8	4	18	18	100%
4.	KBRI Abuja	3	8	3	14	14	100%
5.	KBRI Addis Ababa	7	10	4	21	21	100%
6.	KBRI Alger	2	2	7	11	11	100%
7.	KBRI Amman	12	3	6	21	21	100%
8.	KBRI Ankara	7	8	7	22	22	100%
9.	KBRI Antananarivo	7	5	5	17	17	100%
10.	KBRI Baghdad	3	7	3	13	13	100%
11.	KBRI Beirut	4	2	4	10	10	100%
12.	KBRI Cairo	7	3	6	16	16	100%
13.	KJRI Cape Town	7	3	6	16	16	100%
14.	KBRI Dakar	7	9	4	20	20	100%
15.	KBRI Damaskus	2	20	3	25	25	100%
16.	KBRI Dar Es Salaam	7	2	4	13	13	100%
17.	KBRI Doha	6	8	6	20	20	100%
18.	KJRI Dubai	3	6	3	12	12	100%
19.	KBRI Harare	3	5	4	12	12	100%
20.	KJRI Istanbul	2	2	7	11	11	100%
21.	KJRI Jeddah	7	16	6	29	29	100%
22.	KBRI Khartoum	7	7	10	24	24	100%
23.	KBRI Kuwait	3	2	3	8	8	100%
24.	KBRI Manama	0	2	4	6	6	100%
25.	KBRI Maputo	8	2	7	17	17	100%
26.	KBRI Muscat	8	5	5	18	18	100%
27.	KBRI Nairobi	6	6	3	15	15	100%
28.	KBRI Pretoria	3	3	5	11	11	100%
29.	KBRI Rabat	1	6	4	11	11	100%
30.	KBRI Riyadh	2	5	2	9	9	100%
31.	KBRI Teheran	4	4	5	13	13	100%
32.	KBRI Tripoli	2	1	2	5	5	100%
33.	KBRI Tunis	1	4	3	8	8	100%
34.	KBRI Windhoek	3	4	3	10	10	100%
TOTAL					491	491	100%

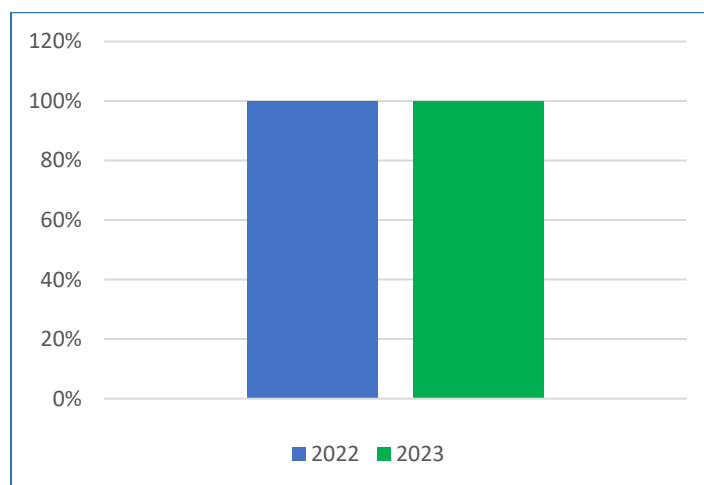
Perbandingan Kinerja

Tabel 3.10 Perbandingan IKU B2.1

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
B2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 3.6

Perbandingan Capaian IKU B2.1



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKU Persentase Rekomendasi Hasil Reviu dokumen anggaran yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III tidak mengalami peningkatan dari semula 100% menjadi 100%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Realisasi IKU B2.1 sebesar 100% telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%, sehingga capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena Satker Pusat dan Perwakilan RI sangat kooperatif dalam memberikan dokumen pendukung dan menindaklanjuti rekomendasi.

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai hasil tersebut terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target IKU B2.1 Persentase Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan yang Ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II, sebagai berikut:

- a) Tahapan revidi secara paralel belum optimal dilakukan dikarenakan belum disusun Program Kerja Revidi (PKR) yang baik;
- b) Pendampingan penyusunan laporan keuangan dilakukan saat tahapan penginputan dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi, namun belum dimulai saat Satuan Kerja melakukan pembebanan anggaran; dan
- c) Hasil bimbingan teknis yang dilakukan Itjen bersama BPO dalam penyusunan RKAK/L tahun 2023 belum semuanya ditindaklanjuti oleh Perwakilan RI.

Sementara itu tantangan terkait capaian IKU B2.1 adalah :

- a) Sifat dan karakter pembayaran pada Perwakilan RI sangat beragam yang berdampak kepada laporan keuangan;
- b) Proses terkait informasi dari Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI terhadap dokumen revidi, data dukung, maupun tindak lanjut yang tidak satu pintu; dan
- c) Tim revidi laporan keuangan belum memiliki tim inti yang kuat dalam kompetensi di bidang akuntansi, aplikasi keuangan dan BMN.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU B2.1 menjadi lebih baik, yaitu:

- a) Inspektorat Jenderal menyusun Program Kerja Revidi (PKR) secara revidi paralel dengan output yang komprehensif;
- b) Koordinasi dengan inspektorat wilayah lain untuk menyusun kegiatan yang dapat memonitor pelaksanaan pembebanan anggaran;
- c) Membentuk tim inti yang terdiri dari auditor senior dengan auditor junior dengan latar belakang pendidikan akuntansi;
- d) Memperkuat forum konsultasi dengan jalur komunikasi informal antara auditor dan Satker;
- e) Membentuk skema pemantauan dan kesepakatan atas hasil bimbingan teknis penyusunan RKA KL; dan
- f) Memperkuat skema kegiatan revidi RKA KL secara paralel dan membentuk *database* setiap hasil revidi secara paralel.

Analisis Program Pendukung Capaian

Selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga), Itjen melakukan tugas pengawasan intern yang salah satu tugasnya yaitu melakukan revidi, klarifikasi dan verifikasi dokumen. Revidi yang dilakukan Inspektorat Wilayah III dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran serta kelengkapan dokumen pendukung. Hingga Desember 2023, Inspektorat Wilayah III telah melaksanakan revidi Laporan Keuangan, revidi RKA-KL, revidi PNBP, revidi PAPBJ, dan revidi Rencana Kebutuhan BMN terhadap Satuan Kerja di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III.

Proyeksi Kedepan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU B2.1 Persentase Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan yang Ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III menjadi lebih baik, yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Biro Umum serta melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan terkait penyampaian dokumen reviu, data dukung, maupun tindak lanjut atas rekomendasi.

B2 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan diukur melalui IKU B2.2

B2.2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

Deskripsi IKU B2.2

APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal Kemenlu.

Temuan APIP adalah hasil pemeriksaan APIP mengenai kewajaran informasi keuangan, administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana, dan kinerja

Yang dimaksud yang **ditindaklanjuti** adalah upaya penyelesaian atas rekomendasi hasil temuan APIP baik yang masih dalam proses penyelesaian maupun yang telah selesai ditindaklanjuti selama tahun 2023.

Ruang Lingkup Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan periode tahun 2011 sampai dengan periode tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti per 31 Desember 2023 ditambah rekomendasi hasil temuan APIP tahun 2023. Sisa Rekomendasi Temuan APIP per 31 Desember 2023 yang belum ditindaklanjuti adalah 40 temuan.

Formula

Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI/
Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan APIP yang harus ditindaklanjuti.

Tujuan

Untuk mengukur seberapa jauh penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI. Guna mencapai tujuan Inspektorat Wilayah III menyusun rencana aksi tahun 2023, sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Data Temuan Itjen Internal TW I, TW II, TW III, dan TW IV.
2. Rekonsiliasi Data Temuan Itjen Internal dengan Satker Terkait (dilakukan secara informal).

Adapun realisasi rencana aksi dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU B2.2 tahun 2023, yaitu:

1. Pelaksanaan rekonsiliasi data temuan dan tindak lanjut pemeriksaan Itjen TW I.
2. Pelaksanaan rekonsiliasi data temuan dan tindak lanjut pemeriksaan Itjen TW II.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi data temuan dan tindak lanjut pemeriksaan Itjen TW III.
4. Pelaksanaan rekonsiliasi data temuan dan tindak lanjut pemeriksaan Itjen TW IV.

Analisis Capaian IKU B2.2

Dalam pencapaian IKU ini menghadapi tantangan berupa perubahan atas kenaikan target IKU sebesar 0,50% dari target semula sebesar 95% pada tahun 2022 menjadi 95,50% pada tahun 2023. Capaian untuk IKU Tindak Lanjut atas Rekomendasi Itjen pada tahun 2023 sebesar 100,71%, sehingga melebihi target yang telah ditentukan meskipun ada *trend* kenaikan target selama dua tahun kebelakang serta tindak lanjut yang masih dalam tahap proses juga diklaim sebagai capaian pada tahun 2023 yang mengakibatkan kenaikan persentase capaian dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.11

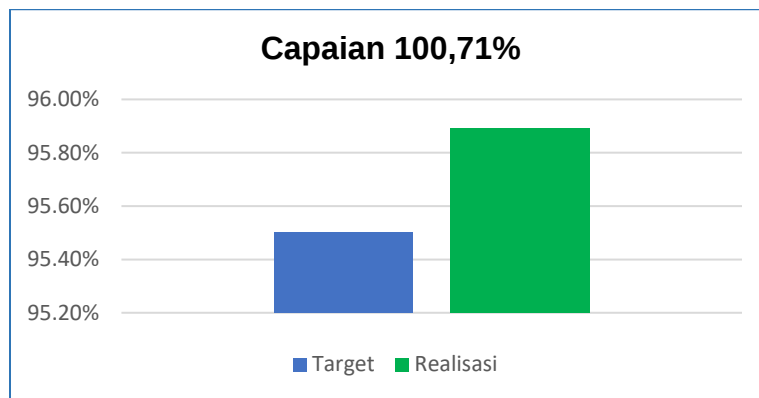
Capaian IKU B2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

Indeks Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Capaian
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI (1007) / Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan APIP yang harus ditindaklanjuti (1047)	100,71%
Total Realisasi		96,18%
Target		95,50%
Capaian		100,71%

Sumber : Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Grafik 3.7

Capaian Kinerja *Internal Business Process Perspective* IKU B2.2



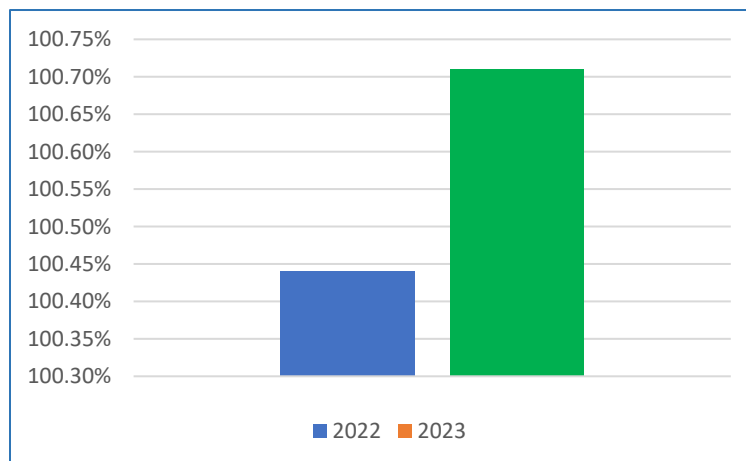
Perbandingan Kinerja

Tabel 3.12 Perbandingan IKU B2.2

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
B2.2	95%	95,42%	100,44%	95,50%	96,18%	100,71%

Grafik 3.8

Perbandingan Capaian IKU B2.2



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKU B2.2 Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III mengalami peningkatan sebesar 0,27% yaitu dari 100,44% menjadi 100,71%.

Pemantauan/penyelesaian tindaklanjut hasil audit merupakan akumulasi rekomendasi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Inspektorat Wilayah III telah melakukan kegiatan rekonsiliasi tindaklanjut rekomendasi hasil audit sampai dengan triwulan IV tahun 2023, dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.13

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Audit Itjen Tahun 2010 – 2023

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			
			Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan dalam Proses TL	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti
2010	112	112	112	0	0	0
2011	79	79	79	0	0	0
2012	107	107	107	1	0	0
2013	92	124	124	0	0	0
2014	101	141	141	1	0	0
2015	42	56	56	0	0	0
2016	30	45	43	2	0	0
2017	41	52	52	0	0	0
2018	59	79	79	0	0	0
2019	49	85	64	7	14	0
2020	19	32	32	1	0	0
2021	38	48	39	4	5	0
2022	23	33	24	0	9	0
2023	13	20	8	0	12	0
Total	839	1047	991	16	40	0

Sumber : Rekapitulasi TL APIP 2010-2023 as of Triwulan IV 2023

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Realisasi IKU B2.2 sebesar 96,18% telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 95,50%, sehingga capaian 100,71%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan. Hal ini disebabkan karena Inspektorat Wilayah III selalu mengingatkan Satker untuk segera menindaklanjuti temuan APIP serta mengirimkan dokumen tindak lanjut ke Inspektorat Wilayah III.

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai hasil tersebut terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target IKU B2.2, sebagai berikut :

- Kegiatan analisa temuan belum dilakukan secara optimal oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga temuan yang sifatnya berulang seharusnya dapat diminimalisir;

- b) Rekomendasi lama yang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan rekomendasi yang diberikan kepada Satker telah berganti pegawai/staf maupun pimpinannya.

Sementara itu tantangan terkait capaian IKU B2.2 yaitu *database* temuan belum disusun secara optimal sehingga hanya menggunakan data dan informasi yang mengandalkan memori tim tindak lanjut.

Upaya Perbaikan

- a) Memperkuat dan melakukan penyempurnaan aplikasi SIPIK sebagai *database* berbasis *web* sebagai salah satu solusi *database* yang belum optimal; dan
- b) Itwil III perlu membentuk mekanisme pengendalian mutu temuan dan penguatan analisa terhadap temuan sehingga temuan yang dimasukkan dalam *database* sehingga dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dalam mencapai hasil tersebut, Inspektorat Wilayah III juga membuat program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target IKU B2.2 yaitu kegiatan Rekonsiliasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit APIP pada Satker Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Perwakilan RI di Timur Tengah dan Afrika secara informal.

Proyeksi Kedepan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU B2.2 menjadi lebih baik, yaitu:

- a) Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dalam rangka penyelesaian tindaklanjut terkait dengan kerugian negara; dan
- b) Berkoordinasi dengan Pejabat terkait di Satuan Kerja yang belum menyelesaikan tindaklanjut secara berkala.

B2 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan diukur melalui IKU B2.3

B2.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

Deskripsi IKU B2.3

BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

Temuan BPK adalah hasil pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Yang dimaksud yang ditindaklanjuti adalah upaya penyelesaian atas rekomendasi hasil temuan BPK baik yang masih dalam proses penyelesaian maupun yang telah selesai ditindaklanjuti selama tahun 2023.

Ruang Lingkup Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan periode tahun 2006 sampai dengan periode tahun 2020 yang belum selesai ditindaklanjuti per 31 Desember 2020 ditambah rekomendasi hasil temuan BPK tahun 2023.

Sisa Rekomendasi Temuan BPK per semester II 2023 yang masih dalam proses adalah 43 temuan.

Formula

Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI/
Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan BPK yang harus ditindaklanjuti.

Tujuan

Untuk mengukur seberapa jauh penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI.

Guna mencapai tujuan Inspektorat Wilayah III menyusun rencana aksi tahun 2023, sebagai berikut: Rekonsiliasi Data Temuan BPK RI Eksternal Semester I dan Semester II.

Adapun realisasi rencana aksi dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKUB2.3 tahun 2023, yaitu:

1. Pelaksanaan rekonsiliasi data temuan dan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI Semester I; dan
2. Pelaksanaan rekonsiliasi data temuan dan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI Semester II.

Analisis Capaian IKU B2.3

Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III. IKU ini merupakan penetapan IKU baru untuk Inspektorat Wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dalam pencapaian IKU ini menghadapi tantangan berupa perubahan atas kenaikan IKU yang cukup signifikan selama dua tahun kebelakang. Hal ini dikarenakan *trend* capaian IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya rendah sehingga dilakukan penyesuaian atas target IKU.

Dalam pencapaian IKU ini menghadapi tantangan berupa perubahan atas kenaikan target IKU sebesar 0,50% dari target semula sebesar 87% pada tahun 2022 menjadi 87,50% pada tahun 2023. Capaian untuk IKU Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2023 sebesar 114,29%, sehingga melebihi target yang telah ditentukan meskipun ada *trend* kenaikan target selama dua tahun kebelakang serta tindak lanjut yang masih dalam tahap proses juga diklaim sebagai capaian pada tahun 2023 yang mengakibatkan kenaikan persentase capaian yang signifikan.

Tabel 3.14

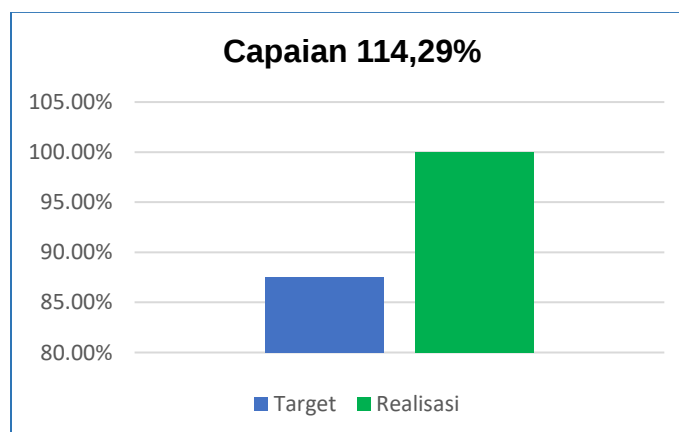
Capaian IKU B2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

Indeks Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Capaian
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI (351) / Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti (351)	114,29%
Total Realisasi		100%
Target		87,50%
Capaian		114,29%

Sumber : Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Grafik 3.9

Capaian Kinerja *Internal Business Process Perspective* IKU B2.2



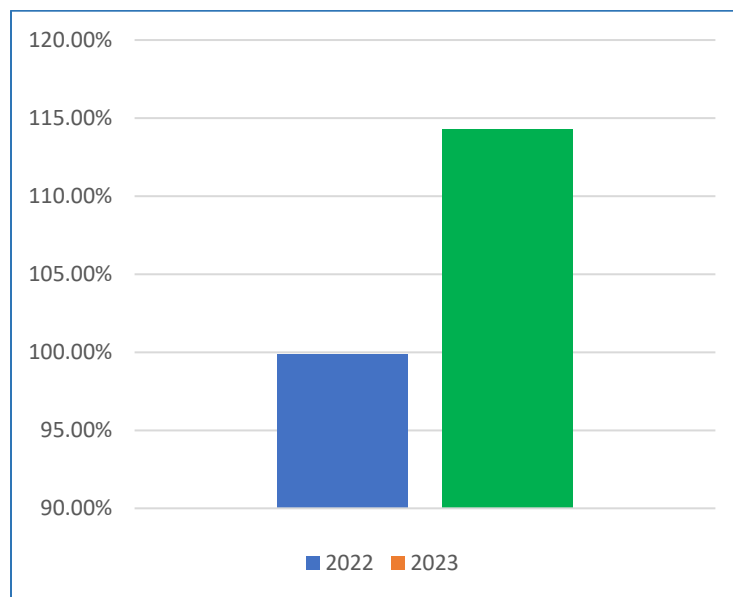
Perbandingan Kinerja

Tabel 3.15 Perbandingan IKU B2.3

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
B2.3	87%	86,89%	99,88%	87,50%	100%	114,29%

Grafik 3.10

Perbandingan Capaian IKU B2.2



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU B2.3 Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III mengalami peningkatan sebesar 14,41% dari capaian 99,88% pada tahun 2022 menjadi 114,29% pada tahun 2023. Pemantauan/penyelesaian tindaklanjut hasil audit merupakan akumulasi rekomendasi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2023. Inspektorat Wilayah III telah melakukan kegiatan rekonsiliasi tindaklanjut rekomendasi hasil audit sampai dengan semester II tahun 2023, dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.16

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2006 – 2023

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			
			Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan dalam Proses TL	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti
2006	11	11	11	0	0	0
2007	103	131	114	17	0	0
2008	34	46	45	1	0	0
2009	6	10	10	0	0	0
2010	8	9	8	1	0	0
2011	10	19	17	2	0	0
2012	33	68	64	4	0	0
2015	10	15	12	3	0	0
2017	9	17	17	0	0	0
2020	5	25	10	15	0	0
Total	229	351	308	43	0	0

Sumber : Rekapitulasi TL BPK PDTT 2006-2023 as of Semester II 2023

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Realisasi IKU B2.3 sebesar 100% telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 87,50%, sehingga mendapatkan capaian sebesar 114,29%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena Inspektorat Wilayah III telah mengingatkan Satker Pusat dan Perwakilan RI terkait penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan koordinasi yang baik terhadap Satker Pusat, Perwakilan RI, Biro Keuangan, dan Biro Umum.

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai hasil tersebut terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target IKU B2.3, sebagai berikut :

- Tim tindaklanjut BPK RI mengalami perubahan setiap tahun dan masing-masing tim memiliki pandangan berbeda mengenai tindaklanjut yang diperlukan untuk rekomendasi BPK;
- Database* temuan belum optimal yang mengakibatkan data dan informasi hanya mengandalkan memori tim tindak lanjut;
- Lemahnya mekanisme serah terima tanggungjawab pekerjaan sehingga informasi dan data pekerjaan tidak berkelanjutan; dan
- Rekomendasi lama yang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan rekomendasi yang diberikan kepada Satker telah berganti pegawai/staf dan pimpinannya.

Sementara itu tantangan terkait capaian IKU B2.3 yaitu *database* temuan belum disusun secara optimal sehingga hanya menggunakan data dan informasi yang mengandalkan memori tim tindak lanjut.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU B2.3 menjadi lebih baik, yaitu:

- a) Mengkomunikasikan data temuan lebih awal ke Tim tindaklanjut BPK;
- b) Itwil III perlu membentuk mekanisme pengendalian mutu temuan dan penguatan analisa terhadap temuan sehingga temuan yang dimasukkan dalam database dapat ditindaklanjuti semua;
- c) Membentuk mekanisme pemantauan tindaklanjut melalui aplikasi SIPTL agar temuan segera ditindaklanjuti; dan
- d) Perlunya dipertimbangkan melibatkan satker Biro Umum (BUM) dan Biro Keuangan (Rokeu) untuk mensinergikan kegiatan dikarenakan BUM dan Rokeu juga memiliki IKU tindaklanjut temuan BPK RI.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dalam mencapai hasil tersebut, Inspektorat Wilayah III juga membuat program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target IKU B2.3, yaitu kegiatan rapat pra-pemantauan tindak lanjut hasil BPK Semester II TA 2023 yang diinisiasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal melalui Nota Dinas No.52250/PW/12/2023/67 dengan mengundang Satker dalam rangka mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2023.

Proyeksi ke Depan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU B2.3 menjadi lebih baik, yaitu:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan Tim Tindaklanjut BPK dan bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan (OAHP) untuk penyelesaian tindaklanjut rekomendasi; dan
- b) Berkoordinasi dengan Pejabat terkait di Satuan Kerja yang belum menyelesaikan tindaklanjut secara berkala.

III.1.3 Learning & Growth Perspective

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah III yang Baik

Deskripsi Sasaran Strategis L1

Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi

Sasaran Strategis (SS) L1 diukur berdasarkan capaian pada 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III.

L1 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah III yang Baik diukur melalui IKU L1.1

L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III

Deskripsi IKU L1.1

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian AKIP meliputi empat komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Target Yang ditetapkan adalah untuk hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya / penilaian yang dilakukan pada tahun 2023 adalah untuk penilaian dokumen AKIP tahun 2022, sehingga target untuk tahun 2023 adalah untuk nilai AKIP 2022.

Formula

Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III

Tujuan

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Wilayah III telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Guna mencapai tujuan Inspektorat Wilayah III menyusun rencana aksi tahun 2023, sebagai berikut: Penyusunan dokumen AKIP (PK, Renja, Renaksi, RKP, RKA-KL), penyusunan dan penginputan e – monev triwulan I-IV, penyusunan dan penginputan AKSI-E-Kinerja 2.0 triwulan I-IV dan penyusunan Laporan Kinerja.

Analisis Capaian IKU L1.1

Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Wilayah III tahun 2022 yang dievaluasi pada tahun 2023 adalah sebesar 79,40 (BB) dari target capaian Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Wilayah III adalah sebesar 79,50 (BB) sehingga diperoleh capaian sebesar 99,87%. Sesuai dengan nota dinas Inspektur Wilayah III Nomor 28503/PW/07/2023/70 Tanggal 10 Juli 2023 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III sebesar 79,40 (BB).

Tabel 3.17

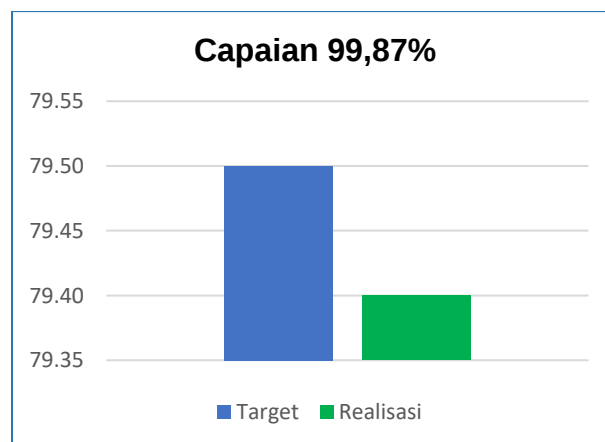
Capaian IKU L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III

Indeks Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Capaian
Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III	99,87%
Total Realisasi		79,40
Target		79,50
Capaian		99,87%

Sumber : Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Grafik 3.11

Capaian Kinerja Learning & Growth Process Perspective IKU L1.1



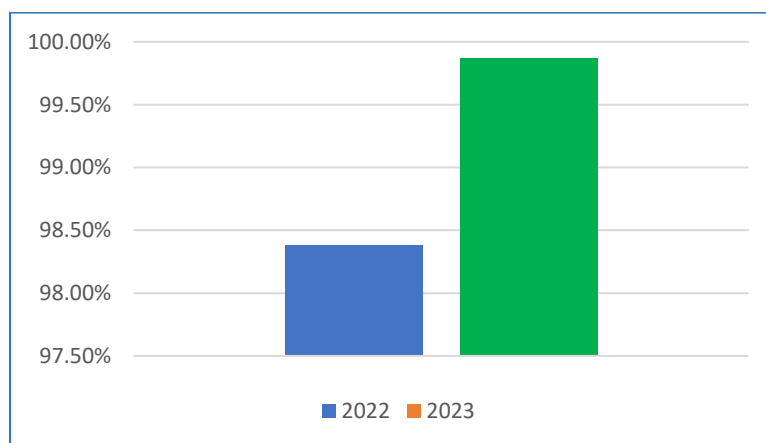
Perbandingan Kinerja

Tabel 3.18 Perbandingan IKU B2.3

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
B2.3	79,50	78,21	98,38%	79,50	79,40	99,87%

Grafik 3.10

Perbandingan Capaian IKU B2.2



Capaian untuk IKU L1.1 berdasarkan penilaian dokumen AKIP Inspektorat Wilayah III tahun 2023 yang memperoleh nilai 79,40 (BB) dari target 79,50 (BB), sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 99,87%. Realisasi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 78,21 (BB) atau capaian sebesar 98,38%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Meningkatnya capaian untuk IKU L1.1 dikarenakan peningkatan koordinasi yang lebih efektif di lingkungan Inspektorat Wilayah III untuk memperkuat kinerja dalam pencapaian target-target IKU. Inspektorat Wilayah III secara berkala menyelenggarakan rapat staf untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas, evaluasi kinerja, evaluasi anggaran, dan perencanaan program kerja ke depan.

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai hasil tersebut terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target IKU L1.1 sebagai berikut:

- a) Perlu internalisasi dan sosialisasi mengenai penetapan kerja serta menetapkan penanggungjawab setiap sasaran strategis dan IKU; dan
- b) Rencana aksi yang disusun belum selaras dengan dokumen penetapan kinerja individu.

Sementara itu tantangan terkait capaian IKU L1.1 yaitu belum optimalnya evaluasi kinerja dan dialog kinerja per triwulan.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif seperti:

- a) Menyusun mekanisme kendali mutu capaian kinerja;
- b) Evaluasi dan pemantauan kinerja;
- c) Mempertimbangkan butir kegiatan yang mendukung pencapaian target agar ditetapkan dalam sasaran kerja pegawai (SKP); dan
- d) Menggunakan *tools* laporan kinerja bulanan pegawai (LBKP) sebagai alat pantau bagi pimpinan.

Analisis Program Pendukung Capaian

Hasil pelaporan kinerja setiap triwulan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan ke depannya. Inspektorat Wilayah III juga hadir dalam rapat-rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO), Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kemenpan RB. Melalui rapat koordinasi tersebut, Inspektorat Wilayah III mengawal pencapaian kinerja dan anggaran, serta mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga capaian kinerja di masa mendatang menjadi lebih baik lagi.

Proyeksi Kedepan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU L1.1 menjadi lebih baik, yaitu:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Program dan Pengendalian Intern (PPI) Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Organisasi untuk menetapkan target capaian yang lebih relevan;
- b) Penerapan mekanisme *reward and punishment* dalam hal pencapaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja di lingkungan Inspektorat Wilayah III; dan
- c) Menyusun mekanisme sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang handal.

NILAI AKIP TAHUN 2022



INSPEKTORAT WILAYAH III

memperoleh nilai 79.40/kategori
penilaian BB (Sangat Baik).

PERENCANAAN KINERJA

BOBOT 30%

SKOR >> 24.0

PENGUKURAN KINERJA

BOBOT 30%

SKOR >> 21.90

PELAPORAN KINERJA

BOBOT 15%

SKOR >> 13.50

EVALUASI INTERNAL

BOBOT 25%

SKOR >> 20.00

BAB IV

PENUTUP



IV.1 SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 dilaksanakan dengan merujuk pada dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, dan DIPA 2023. Capaian sasaran pelaksanaan tugas Inspektorat Wilayah III diukur melalui indikator sasaran yang telah ditetapkan dan tercermin dari pencapaian kinerja serta indikator hasil pada Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) sebesar 107,41% dengan predikat istimewa didukung dengan anggaran sebesar _____ yang terealisasi sebesar _____ atau sebesar 99,99%.

Seluruh capaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis, mulai dari proses perencanaan, pengukuran kinerja hingga evaluasi terhadap seluruh hasil yang dicapai serta kerja sama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Inspektorat Wilayah III.

Berdasarkan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan intern, Inspektorat Wilayah III telah melakukan audit kinerja pada Satker Pusat pada Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan dan Biro SDM) dan Perwakilan RI di luar negeri (KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai). Disamping melaksanakan kegiatan pengawasan berupa audit, Inspektorat Wilayah III melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya, yaitu Reviu atas Laporan Keuangan Kemlu TA 2022 dan Semester I TA 2023, Reviu RKA-K/L TA 2024, Reviu RKBMN TA 2025, Pendampingan Dan Asistensi Atas Kegiatan Satker Pusat dan Perwakilan RI, Legalisasi dan Verifikasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Perwakilan, Pertanggungjawaban Keuangan, Pendampingan Terhadap Kasus-Kasus Kepegawaian/Keuangan/Perlengkapan, *clearance* pegawai yang diusulkan untuk menduduki jabatan, kenaikan pangkat dan gelar serta melakukan Pemantauan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), mengikuti sosialisasi terkait pengawasan dan tugas lain sesuai instruksi pimpinan.

IV.2 KENDALA DAN TANTANGAN

Dalam rangka memperoleh Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) dengan predikat Istimewa pada tahun ini. Inspektorat Wilayah III mengalami beberapa kendala dan tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu :

Kendala yang terutama adalah :

- a) Minimnya alokasi anggaran untuk pengawasan yang lebih optimal, sebagai contoh pada tahun 2023 hanya 1 (kali) dilaksanakan kegiatan Audit ke Satker Perwakilan RI di Wilayah Afrika dan Timur Tengah mengingat bahwa salah satu bukti audit yang konkrit adalah pemeriksaan fisik untuk memverifikasi keberadaan aset Barang Milik Negara (BMN), sehingga auditor harus melakukan verifikasi dan meninjau secara fisik keberadaan aset tersebut serta memeriksa kondisi aset tersebut secara langsung.
- b) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat terbatas dibandingkan dengan *bezetting* yang telah ditentukan, pada kasus di Inspektorat Wilayah III juga terdapat perpindahan 2 (dua) staf Auditor yang melakukan SK.111 dan mutasi ke Inspektorat Wilayah II pada tahun ini yang semakin mengurangi jumlah SDM serta tidak terdapat Auditor Muda (Ketua Tim) dalam komposisi Auditor di Inspektorat Wilayah III.

Sementara untuk tantangannya adalah :

- a) Semakin banyak kegiatan *pop-up* di lingkungan Inspektorat Jenderal, pada tahun ini contohnya terdapat Telaah Sejawat Internal dan Penilaian Maturitas SPIP sehingga menambah beban kerja Auditor yang berbenturan dengan berbagai kegiatan pengawasan lainnya karena keterbatasan jumlah Auditor di Inspektorat Wilayah III.
- b) Kemampuan dan kompetensi Auditor di Inspektorat Wilayah III yang sangat beragam dan sesuai bidangnya masing-masing, sehingga dibutuhkan kecakapan dalam bidang pengawasan yang multidimensi dan dinamis.

IV.3 PROYEKSI KEDEPAN

Mengantisipasi upaya pencapaian sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenlu RI serta semakin meningkatnya tugas dan fungsi pengawasan intern di masa mendatang, Inspektorat Wilayah III melakukan langkah-langkah antisipatif antara lain dengan melakukan penguatan fungsi pengawasan melalui peningkatan kualitas audit kinerja dengan penajaman pada substansi dan metode audit, pelaksanaan audit bersama, intensifikasi pemantauan tindak lanjut, peningkatan penyelesaian kerugian negara dan *sharing knowledge* antar Auditor.

Pada tahun 2024, Inspektorat Wilayah III akan berfokus pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA 2024 yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya sesuai tugas dan fungsi Auditor Internal.

---o0o---

LAMPIRAN I

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR WILAYAH III**



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Lanang Seputro
Jabatan : Inspektur Wilayah III

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

N a m a : Ibnu Wahyutomo
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

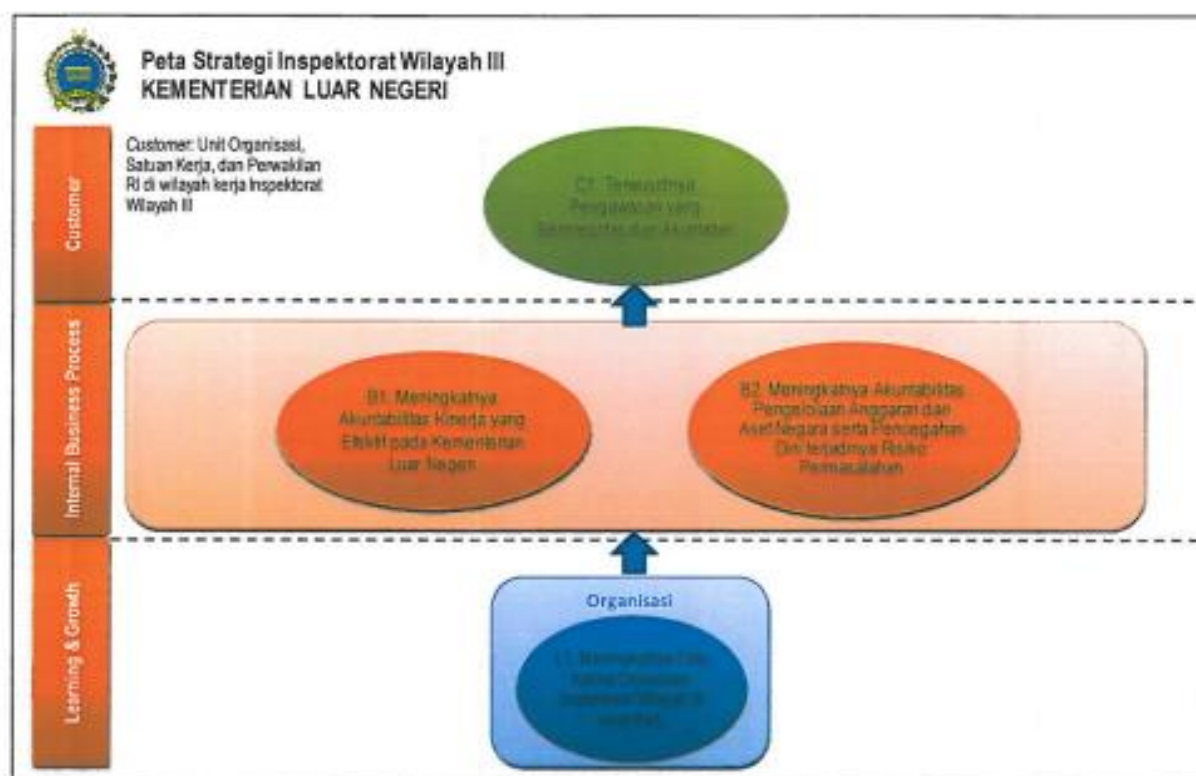
Pihak Kedua,


Ibnu Wahyutomo

Pihak Pertama,


Lanang Seputro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT WILAYAH III



Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Customer Perspective				
C1	Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	C1.1	Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah III	3 (skala 4)
Internal Business Process Perspective				
B1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri	B1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	68%

Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan	B2.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	100%
		B2.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	95,50%
		B2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	87,50%
Learning & Growth Perspective				
L1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah III yang Baik	L1.1	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III	79,5 (BB)

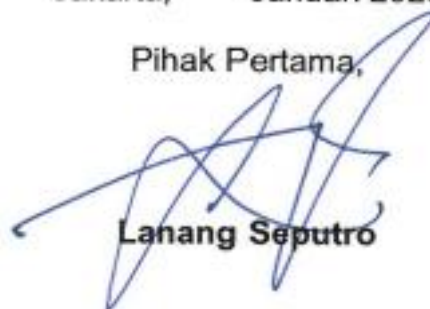
No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	
Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah III 2023		

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,


Ibnu Wahyutomo

Pihak Pertama,


Lanang Seputro

LAMPIRAN II

**MATRIKS REALISASI RENCANA
AKSI (RENAKSI) PK**

**Matriks Realisasi Rencana Aksi
INSPEKTORAT WILAYAH 3
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023					Rincian Kegiatan					% Capaian	a. Narasi Realisasi Kinerja b. Faktor Penghambat/ Kendala c. Peningkatan/ Langkah Perbaikan/ Proyeksi Kedepan
			Target/ Realisasi Tahunan	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	Urutan Kegiatan	Indikator Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C1	Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah III	Target: 3 Realisasi: xxxx	Target: - Realisasi: xxxx	Target: - Realisasi: xxxx	Target: - Realisasi: xxxx	Target: 3 Realisasi: 3,37	Nama Kegiatan : Analisa RPT dan RPR Sakor Pusat dan Perwakilan Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	14 17,065,000	14 17,065,000	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan Analisa RPT dan RPR Sakor Pusat dan Perwakilan pada bulan November 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada Narasi: Telah dilaksanakan Verifikasi SBIPA Semester I dan II pada Bulan Juli dan Desember 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada Narasi: Telah dilaksanakan Verifikasi Satyalancana Karya Satya pada Bulan Maret 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada Narasi: Telah disusun Laporan SPMP Semester I dan pada Bulan Maret dan Desember 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada Narasi: Telah dilaksanakan Kegiatan Audit pada Sakor di Perwakilan RI pada Abu Dhabi dan Dubai pada bulan April 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada Narasi : Telah dilaksanakan Kegiatan Audit pada Sakor Pusat yaitu Biro SDM dan Biro Keuangan pada bulan September 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
								Nama Kegiatan : Verifikasi Biaya Bantuan Pendidikan Anak (BBPA) Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	2 -	2 -	100.00% -	
								Nama Kegiatan : Verifikasi Satyalancana Karya Satya Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	2 -	2 -	100.00% -	
								Nama Kegiatan : Peninjauan Mutu Penilaian Mandiri Mutu SBMP Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	14 9,756,766	14 9,756,766	100.00% 100.00%	
								Nama Kegiatan : Audit pada unit organisasi dan satuan kerja di luar negeri Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	14 873,602,544	14 873,602,544	100.00% 100.00%	
								Nama Kegiatan : Audit pada unit organisasi dan satuan kerja di dalam negeri Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	14 387,519,752	14 387,491,710	100.00% 99.99%	
B1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang efektif pada Kementerian Luar Negeri	B1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	Target: 88% Realisasi: xxxx	Target: - Realisasi: xxxx	Target: - Realisasi: xxxx	Target: - Realisasi: xxxx	Target: 88% Realisasi: 82,80%	Nama Kegiatan : Evaluasi AKIP Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	14 28,880,000	14 28,880,000	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi AKIP pada Bulan Juli 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Reviu LKJ tingkat Kementerian pada Bulan Februari 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
								Nama Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja (LKJ) Tingkat Kementerian Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	14 28,880,000	14 28,880,000	100.00% 100.00%	
B2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan	B2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	Target: 100% Realisasi: xxxx	Target: - Realisasi: xxxx	Target: 50% Realisasi: 100%	Target: 50% Realisasi: 46,32%	Target: 100% Realisasi: 100%	Nama Kegiatan : Reviu Revisi Anggaran TA 2023 Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	12 -	12 -	100.00% -	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Reviu Reviu Revisi Anggaran Buku Beker dan Reviu Revisi Usulan RKBMN 2023 pada bulan Juli 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Telaah BAPK pada Bulan Januari 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Reviu PPK pada Bulan Februari 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
								Nama Kegiatan : Telaah Berita Acara Pemeriksaan Keuangan (BAPK) Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	2 11,391,767	2 11,391,767	100.00% 100.00%	
								Nama Kegiatan : Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Orang Rupiah	2 34,168,000	2 34,168,000	100.00% 100.00%	

							Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ deb.	Laporan/ Dokumen/ Orang/ deb.	1	1	100.00%	Langkah / tindakan / hasil
							Nama Kegiatan: Reriu Laporan Keuangan Tahun 2022, Semester I 2023, dan Trwulan II 2023, serta Bimtek/ serta Pendampingan penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian Tahun 2022, Semester I 2023, dan Trwulan II 2023 Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ deb.	Orang Rupiah	14 236,068,777	14 236,068,777	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan LK Tahun 2022 dan Reriu LK Kementerian Tahun 2022 pada Bulan Januari 2023 Telah dilaksanakan kegiatan Reriu LK Sektor pada Bulan Maret 2023 Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 (Audited) pada bulan April 2023 Telah dilaksanakan kegiatan Reriu LK Sektor pada Bulan Agustus 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
							Nama Kegiatan: Reriu RKSN Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ deb.	Orang Rupiah	2 11,616,766	2 11,616,766	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Reriu RKSN pada bulan November 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
							Nama Kegiatan: Reriu Penyerapan Anggaran Belanja dan Realisasi Pendapatan serta Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (PBJ) Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ deb.	Orang Rupiah	4 12,060,000	4 12,060,000	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Reriu PABJ Trwulan I, II, dan IV pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
							Nama Kegiatan: Pendataan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan/ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ deb.	Orang Rupiah	2 9,456,766	2 9,456,766	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Reriu PNBP pada bulan Agustus 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
							Nama Kegiatan: Reriu RKA-KL Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ deb.	Orang Rupiah	13 129,670,000	13 129,670,000	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Pra Reriu RKA-KL dan Bimtek RKA-KL pada bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
							Nama Kegiatan: Rapat Tim Penyelidikan Kerugian Negara (TPKN) Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ deb.	Orang Rupiah	2 14,238,000	2 14,238,000	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Rapat TPKN Semester I dan II pada bulan Juli dan Desember 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
							Nama Kegiatan: Rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Ijin TW I, TW II, TW III, dan TW IV Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ deb.	Orang Rupiah	2 7,830,000	2 7,830,000	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan Rekomendasi TL AP/PP Semester I-IV pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
							Nama Kegiatan: Pemantauan Tindak Lanjut Penyelidikan Penasihat Kerja (PK) Minus Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Input: - SDM - Anggaran Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ deb.	Orang Rupiah	2 6,329,266	2 6,329,266	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan monitoring tindak lanjut Penyelidikan PK Minus pada bulan Januari 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
							Nama Kegiatan: Pemantauan Tindak Lanjut Penyelidikan Tindakan Perbuatan Kurang dan Tindakan Ganti Rugi (TP TGR) Output:	Input: - SDM - Anggaran Output:	Orang Rupiah	2 7,296,767	2 7,296,767	100.00% 100.00%	Narasi : Telah dilaksanakan kegiatan monitoring tindak lanjut TP/TGR pada bulan Januari 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
B2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	TARGET: 95,5% Realisasi: xxxx	TARGET: - Realisasi: xxxx	TARGET: 95,5% Realisasi: 95,52	TARGET: 95,5% Realisasi: 95,52	TARGET: 95,5% Realisasi: 96,18%								

52.2
 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit AP/PP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II

Target:
 95,9%

 Realisasi:
 xxxx

Target:
 -

 Realisasi:
 xxxx

Target:
 95,5%

 Realisasi:
 95,52

Target:
 95,5%

 Realisasi:
 95,52

Target:
 95,5%

 Realisasi:
 96,18%

								Tempat dan waktu pelaksanaan:-	- Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Laporan/ Dokumen/ Orang/ dab.	1	1	100.00%	
		82.3	Target: 87,5%	Target: -	Target: 87,5%	Target: 87,5%	Target: 87,5%	Nama Kegiatan: Rapat Tim Penyelidikan Korupsi Negara (TPKN)	Input: - SDM - Anggaran	Orang Rupiah	2 14,238,000	2 14,238,000	100.00% 100.00%	Naras: Telah dilaksanakan kegiatan Rapat TPKN Semester I dan II pada bulan Desember 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
			Realisasi: xxxx	Realisasi: xxxx	Realisasi: 86,89	Realisasi: 86,89	Realisasi: 100%	Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Laporan/ Dokumen/ Orang/ dab.	2	2	100.00%	
								Nama Kegiatan: Rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I dan Semester II	Input: - SDM - Anggaran	Orang Rupiah	2 13,191,767	2 13,191,767	100.00% 100.00%	Naras: Telah dilaksanakan kegiatan Rapat TL BPK Semester I dan II pada bulan Juli dan Desember 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
								Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Laporan/ Dokumen/ Orang/ dab.	2	2	100.00%	
								Nama Kegiatan: Pemantauan Tindak Lanjut Penyelesaian Persekol Kerja (PK) Minus	Input: - SDM - Anggaran	Orang Rupiah	2 6,329,286	2 6,329,286	100.00% 100.00%	Naras: Telah dilaksanakan kegiatan monitoring tindak lanjut Penyelesaian PK Minus pada bulan Januari 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
								Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Laporan/ Dokumen/ Orang/ dab.	1	1	100.00%	
								Nama Kegiatan: Pemantauan Tindak Lanjut Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR)	Input: - SDM - Anggaran	Orang Rupiah	2 7,296,767	2 7,296,767	100.00% 100.00%	Naras: Telah dilaksanakan kegiatan monitoring tindak lanjut TP/TGR pada bulan Januari 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
								Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Laporan/ Dokumen/ Orang/ dab.	1	1	100.00%	
L1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah I yang Baik	L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III	Target: 79,5 Realisasi: xxxx	Target: - Realisasi: xxxx	Target: - Realisasi: xxxx	Target: - Realisasi: xxxx	Target: 79,5 Realisasi: 79,4	Nama Kegiatan: Penyusunan Dokumen AKIP (PK, Renja KL, RKP, Rinsaki, RKA KL, e-monitor, e-kinerja, LK, Disbursement Plan)	Input: - SDM - Anggaran	Orang Rupiah	14 17,580,000	14 17,580,000	100.00% 100.00%	Naras: Telah dilaksanakan penyusunan Dokumen AKIP hingga Triwulan IV Faktor Penghambat: Tidak ada Langkah Perbaikan: Tidak ada
								Tempat dan waktu pelaksanaan:-	Output: - Laporan/ Dokumen / Orang/ dab.	Laporan/ Dokumen/ Orang/ dab.	33	33	100.00%	

LAMPIRAN III

MATRIKS INFORMASI KINERJA

IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pengawasan Inspektorat Wilayah III

Formula : Rata-rata Indeks Kepuasan terhadap Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III

Sumber : Hasil Survei Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan

Periode : Januari-Desember tahun berjalan (Sesuai Manual IKU)

Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pengawasan Inspektorat Wilayah III	3,37
--	-------------

Jumlah Total Responden
32

Keterangan Bobot Penilaian	
Memuaskan	4
Baik	3
Cukup	2
Kurang	1

Hasil Survei Jenis Pelayanan Audit	Jumlah Responden
	12

No	Pertanyaan Layanan Audit	Jumlah Responden yang menjawab Memuaskan	Jumlah Responden yang menjawab Baik	Jumlah Responden yang menjawab Cukup	Jumlah Responden yang menjawab Kurang
1.	Komunikasi dan koordinasi dalam memberikan layanan Audit	6	5	1	-
2.	Kompetensi dan pengetahuan dalam memberikan layanan Audit	6	4	2	-
3.	Sikap dan perilaku tim dalam melaksanakan tugas/layanan Audit	7	4	1	-
4.	Kejelasan prosedur dan informasi layanan Audit	6	4	2	-
5.	Integritas dan profesionalisme untuk menerapkan prinsip Non-KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)	6	5	1	-

6.	Independensi dan objektivitas dalam memberikan layanan Audit	6	5	1	-
7.	Manfaat layanan dan rekomendasi yang diberikan	6	4	2	-
8.	Efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu dan sumber daya selama memberikan layanan Audit	6	5	1	-

Hasil Survei Jenis Pelayanan Reviu	Jumlah Responden
	6

No	Pertanyaan Layanan Reviu	Jumlah Responden yang menjawab Memuaskan	Jumlah Responden yang menjawab Baik	Jumlah Responden yang menjawab Cukup	Jumlah Responden yang menjawab Kurang
1.	Komunikasi dan koordinasi dalam memberikan layanan Reviu	2	4	-	-
2.	Kompetensi dan pengetahuan dalam memberikan layanan Reviu	2	4	-	-
3.	Sikap dan perilaku tim dalam melaksanakan tugas/layanan Audit	4	2	-	-
4.	Kejelasan prosedur dan informasi layanan Reviu	4	2	-	-
5.	Integritas dan profesionalisme untuk menerapkan prinsip Non-KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)	4	2	-	-
6.	Independensi dan objektivitas dalam memberikan layanan Reviu	4	2	-	-

7.	Manfaat layanan dan rekomendasi yang diberikan	3	3	-	-
8.	Efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu dan sumber daya selama memberikan layanan Reviu	3	3	-	-

Hasil Survei Jenis Pelayanan Evaluasi	Jumlah Responden
	10

No	Pertanyaan Layanan Evaluasi	Jumlah Responden yang menjawab Memuaskan	Jumlah Responden yang menjawab Baik	Jumlah Responden yang menjawab Cukup	Jumlah Responden yang menjawab Kurang
1.	Komunikasi dan koordinasi dalam memberikan layanan Evaluasi	4	5	1	-
2.	Kompetensi dan pengetahuan dalam memberikan layanan Evaluasi	2	8	-	-
3.	Sikap dan perilaku tim dalam melaksanakan tugas/layanan Evaluasi	2	7	1	-
4.	Kejelasan prosedur dan informasi layanan Evaluasi	1	8	1	-
5.	Integritas dan profesionalisme untuk menerapkan prinsip Non-KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)	4	6	-	-
6.	Independensi dan objektivitas dalam memberikan layanan Evaluasi	3	7	-	-
7.	Manfaat layanan dan rekomendasi yang diberikan	2	8	-	-
8.	Efisiensi dan efektivitas penggunaan	5	5	-	-

	waktu dan sumber daya selama memberikan layanan Evaluasi				
--	--	--	--	--	--

Hasil Survei Jenis Pelayanan Pengawasan Lainnya	Jumlah Responden
	4

No	Pertanyaan Layanan Evaluasi	Jumlah Responden yang menjawab Memuaskan	Jumlah Responden yang menjawab Baik	Jumlah Responden yang menjawab Cukup	Jumlah Responden yang menjawab Kurang
1.	Komunikasi dan koordinasi dalam memberikan layanan Pengawasan Lainnya	1	3	-	-
2.	Kompetensi dan pengetahuan dalam memberikan layanan Pengawasan Lainnya	1	2	1	-
3.	Sikap dan perilaku tim dalam melaksanakan tugas/layanan Pengawasan Lainnya	2	2	-	-
4.	Kejelasan prosedur dan informasi layanan Pengawasan Lainnya	1	2	1	-
5.	Integritas dan profesionalisme untuk menerapkan prinsip Non-KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)	3	1	-	-
6.	Independensi dan objektivitas dalam memberikan layanan Pengawasan Lainnya	2	2	-	-
7.	Manfaat layanan dan rekomendasi yang diberikan	3	1	-	-
8.	Efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu dan sumber daya selama memberikan layanan Pengawasan Lainnya	1	2	1	-

B1.1 REKAPITULASI REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) YANG DITINDAKLANJUTI UNIT ORGANISASI, SATUAN KERJA, DAN PERWAKILAN RI DI WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH III

NO.	UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA/PERWAKILAN RI	REKOMENDASI LHE AKIP 2023			
		JUMLAH TOTAL	SUDAH DI-TL	PERSENTASE	KODEFIKASI DATA DUKUNG
1.	Setjen	5	5	100%	03450/PR/10/2023/03
2.	Itjen	5	5	100%	46235/PW/10/2023/67
3.	BHAKP	5	5	100%	46691/HK/11/2023/22
4.	BDSP	9	9	100%	46250/PR/10/2023/21
5.	Biro Keuangan	6	6	100%	46444/KU/11/2023/25
6.	BSDM	5	5	100%	46464/PW/11/2023/24
7.	Biro Umum	5	5	100%	46473/PL/11/2023/26
8.	BPO	5	5	100%	44960/OT/10/2023/23
9.	Itwil I	2	2	100%	44051/PW/10/2023/68
10.	Itwil II	5	5	100%	45945/PW/10/2023/69
11.	Itwil III	3	3	100%	54689/PW/12/2023/70
12.	Itwil IV	2	2	100%	51814/PW/12/2023/71
13.	Setitjen	1	1	100%	46235/PW/10/2023/67
14.	KBRI Dar Es Salaam	6	6	100%	B-00199/Dar es Salaam/231031
15.	KBRI Windhoek	4	4	100%	B-00299/Windhoek/231101
16.	KJRI Dubai	6	6	100%	B-00246/Dubai/231101
17.	KBRI Pretoria	7	0	0%	Belum mengirimkan TL
18.	KBRI Cairo	6	6	100%	B-00392/Cairo/231128
19.	KJRI Cape Town	6	0	0%	Belum mengirimkan TL
20.	KBRI Antananarivo	12	12	100%	B-00339/Antananarivo/231031
21.	KBRI Rabat	10	10	100%	B-00236/Rabat/231229
22.	KBRI Tehran	4	4	100%	B-00160/Teheran/230807
23.	KBRI Addis Ababa	6	6	100%	B-00225/Addis Ababa/231020
24.	KBRI Beirut	5	5	100%	B-00199/Beirut/230908
25.	KBRI Nairobi	6	5	100%	B-00631/Nairobi/231229
26.	KBRI Manama	3	3	100%	B-00382/Manama/231228
27.	KBRI Doha	13	0	0%	Belum mengirimkan TL
28.	KBRI Ankara	7	7	100%	B-00378/Ankara/231121
29.	KBRI Harare	9	0	0%	Belum mengirimkan TL
30.	KJRI Jeddah	5	5	100%	B-00647/Jeddah/231225
31.	KBRI Damaskus	7	7	100%	B-00241/Damaskus/231103
32.	KBRI Riyadh	8	8	100%	B-00800/Riyadh/231231
33.	KBRI Abuja	6	0	0%	Belum mengirimkan TL
34.	KBRI Amman	6	6	100%	B-00300/Amman/231107
35.	KBRI Khartoum	7	0	0%	Belum mengirimkan TL
36.	KBRI Tunis	6	6	100%	B-00308/Tunis/231229
37.	KBRI Tripoli	7	7	100%	B-00313/Tripoli/231031
38.	KBRI Abu Dhabi	8	8	100%	B-00412/Abu Dhabi/231127
39.	KBRI Baghdad	6	6	100%	B-00236/Baghdad/231230
40.	KBRI Dakar	8	8	100%	B-00154/Dakar/231023
41.	KBRI Muscat	10	10	100%	B-00163/Muscat/231127
42.	KBRI Kuwait City	6	6	100%	B-00291/Kuwait/231105
43.	KJRI Istanbul	9	9	100%	B-00002/Istanbul/240104
44.	KBRI Maputo	6	6	100%	B-00157/Maputo/231107
45.	KBRI Alger	6	6	100%	B-00224/Alger/231126

**B2.1. REKAPITULASI REKOMENDASI HASIL REVIU DOKUMEN KEUANGAN YANG
DITINDAKLANJUTI UNIT ORGANISASI, SATUAN KERJA, DAN PERWAKILAN RI DI
WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH III TRIWULAN IV TAHUN 2023**

NO	UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA/PERWAKILAN RI	REKOMENDASI					
		Reviu LK Semester II 2022	Reviu LK Semester I 2023	Reviu RKA KL 2024	JUMLAH TOTAL	SUDAH DI TL	PERSENTASE
1.	Inspektorat Jenderal	4	5	0	9	9	100%
2.	Sekretariat Jenderal	2	9	0	11	11	100%
3.	KBRI Abu Dhabi	6	8	4	18	18	100%
4.	KBRI Abuja	3	8	3	14	14	100%
5.	KBRI Addis Ababa	7	10	4	21	21	100%
6.	KBRI Alger	2	2	7	11	11	100%
7.	KBRI Amman	12	3	6	21	21	100%
8.	KBRI Ankara	7	8	7	22	22	100%
9.	KBRI Antananarivo	7	5	5	17	17	100%
10.	KBRI Baghdad	3	7	3	13	13	100%
11.	KBRI Beirut	4	2	4	10	10	100%
12.	KBRI Cairo	7	3	6	16	16	100%
13.	KJRI Cape Town	7	3	6	16	16	100%
14.	KBRI Dakar	7	9	4	20	20	100%
15.	KBRI Damaskus	2	20	3	25	25	100%
16.	KBRI Dar Es Salaam	7	2	4	13	13	100%
17.	KBRI Doha	6	8	6	20	20	100%
18.	KJRI Dubai	3	6	3	12	12	100%
19.	KBRI Harare	3	5	4	12	12	100%
20.	KJRI Istanbul	2	2	7	11	11	100%
21.	KJRI Jeddah	7	16	6	29	29	100%
22.	KBRI Khartoum	7	7	10	24	24	100%
23.	KBRI Kuwait	3	2	3	8	8	100%
24.	KBRI Manama	0	2	4	6	6	100%
25.	KBRI Maputo	8	2	7	17	17	100%
26.	KBRI Muscat	8	5	5	18	18	100%
27.	KBRI Nairobi	6	6	3	15	15	100%
28.	KBRI Pretoria	3	3	5	11	11	100%
29.	KBRI Rabat	1	6	4	11	11	100%
30.	KBRI Riyadh	2	5	2	9	9	100%
31.	KBRI Teheran	4	4	5	13	13	100%
32.	KBRI Tripoli	2	1	2	5	5	100%
33.	KBRI Tunis	1	4	3	8	8	100%
34.	KBRI Windhoek	3	4	3	10	10	100%
TOTAL					491	491	100%

B2.2 Rekapitulasi Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			
			Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan dalam Proses TL	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti
2010	112	112	112	0	0	0
2011	79	79	79	0	0	0
2012	107	107	107	1	0	0
2013	92	124	124	0	0	0
2014	101	141	141	1	0	0
2015	42	56	56	0	0	0
2016	30	45	43	2	0	0
2017	41	52	52	0	0	0
2018	59	79	79	0	0	0
2019	49	85	64	7	14	0
2020	19	32	32	1	0	0
2021	38	48	39	4	5	0
2022	23	33	24	0	9	0
2023	13	20	8	0	12	0
Total	839	1047	991	16	40	0

B2.3 Rekapitulasi Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			
			Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan dalam Proses TL	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti
2006	11	11	11	0	0	0
2007	103	131	114	17	0	0
2008	34	46	45	1	0	0
2009	6	10	10	0	0	0
2010	8	9	8	1	0	0
2011	10	19	17	2	0	0
2012	33	68	64	4	0	0
2015	10	15	12	3	0	0
2017	9	17	17	0	0	0
2020	5	25	10	15	0	0
Total	229	351	308	43	0	0



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor: 28503/PW/07/2023/70

Kepada : Yth. Inspektur Wilayah III
Tembusan : 1. Yth. Inspektur Jenderal (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Jenderal
3. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Dari : Inspektur Wilayah III
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Inspektorat Wilayah III

Merujuk perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 di lingkungan kerja Saudara. Dalam rangka meningkatkan kualitas AKIP, kami mengharapkan kiranya Saudara dapat menindaklanjuti rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Evaluasi dan menyampaikan tindak lanjut ke Inspektorat Jenderal paling lambat tanggal 1 November 2023, sesuai format terlampir.

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam mengimplementasikan sistem AKIP sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian Luar Negeri RI.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Jakarta, 10 Juli 2023



Lanang Seputro
NIP. 19680107 199303 1 011



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT WILAYAH III
TAHUN 2022

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
JUNI 2023

Ringkasan Eksekutif
Laporan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pada Inspektorat Wilayah III
Tahun 2022

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Wilayah III. Pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2022 berpedoman pada Keputusan Inspektur Jenderal No. 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
2. Dokumen AKIP telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenlu Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia. Inspektorat Wilayah III telah menyusun dokumen AKIP yang antara lain terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Kinerja (LKj) yang memiliki IKU sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi.
3. Penilaian terhadap capaian kinerja dilakukan dengan memperhatikan aspek pencapaian target, keandalan data, kualitas data kinerja serta pencapaian sasaran kinerja berorientasi *outcome* yang secara umum telah disajikan dengan cukup baik.
4. Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Inspektorat Wilayah III pada tahun 2022 adalah sebesar 104,5 atau mengalami kenaikan 2,05 poin dari tahun sebelumnya (2021) yang tercatat sebesar 102,45. Pada tahun 2022, Inspektorat Wilayah III memperoleh pagu anggaran sebesar Rp1.186.409.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.185.393.127,00 atau terserap sebesar 99,91%. Penyerapan anggaran di tahun 2022 masih belum berubah jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 99,91%.
5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, Evaluasi AKIP tahun 2022 dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
6. Nilai hasil evaluasi AKIP pada Inspektorat Wilayah III untuk tahun 2022 sebesar 79,40 (BB). Nilai ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengingat terdapat perubahan bobot dan cakupan komponen dan subkomponen evaluasi serta kriteria penilaian yang digunakan.

7. Inspektorat Wilayah III telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi APIP tahun sebelumnya, antara lain:
 - Agar mencantumkan infografis pada laporan kinerja yang memuat informasi terkait capaian kinerja Inspektorat Wilayah III;
8. Guna meningkatkan kualitas AKIP di tahun mendatang, kami merekomendasikan kepada Inspektorat Wilayah III untuk melakukan upaya-upaya perbaikan antara lain:
 - a. Agar mengimplementasikan atas rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan pada dialog kinerja sebagai upaya percepatan dalam peningkatan kinerja satuan kerja terkait;
 - b. Agar menambahkan informasi terkait sumber data dukung capaian kinerja pak LKj tahun berikutnya;
 - c. Agar memperhatikan penetapan target IKU sehingga capaiannya tidak melebihi 120%.

Bab I

Pendahuluan

1. Dasar hukum pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
 - f. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 01/B/RO/XII/2022/01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 11/B/LA/VI/2022/01 tahun 2022 tentang Peta Strategi dan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2022; dan
 - h. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
2. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022 Inspektorat Wilayah III yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (Renaksi), Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Kinerja (LKj). Selain itu, untuk melihat upaya perbaikan yang dilakukan dalam pengelolaan kinerja TA 2022, juga dilakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di TA 2023 khususnya PK. Evaluasi AKIP pada Inspektorat Wilayah III telah selesai bulan Juni 2023.
3. Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP adalah:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya; dan
 - f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) pada Unit Organisasi, Unit Kerja, dan Perwakilan RI.
4. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja; dan
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan evaluasi (pra evaluasi) dan evaluasi dengan menggunakan metodologi pengumpulan data dan informasi, analisa dokumen serta wawancara dengan Pengelola Kinerja.
6. Gambaran Umum Inspektorat Wilayah III
 - a. Inspektorat Wilayah III memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp813.149.000,00 (*Tahun 2022*) yang beberapa kali mengalami penyesuaian di tahun berjalan sehingga pagu akhir Inspektorat Wilayah III adalah sebesar Rp1.186.409.000,00.
 - b. Inspektorat Wilayah III menetapkan 4 Sasaran Strategis yang diukur dengan 6 IKU dengan target sebagaimana tercantum dalam PK Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 yang ditandatangani Menteri Luar Negeri pada bulan Januari 2022.
7. Gambaran Umum AKIP
 - a. Hasil Penilaian atas AKIP
Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Wilayah III memperoleh nilai 79,40 tau dengan kategori penilaian **BB** (Sangat Baik)
 - b. Rekomendasi tahun sebelumnya:
 - 1) Agar memperhitungkan penetapan target sesuai dengan capaian kinerja tahun sebelumnya serta situasi dan kondisi Inspektorat Wilayah III, sehingga nantinya realisasi seluruh IKU dapat tercapai sesuai target yang direncanakan;
 - 2) Agar memanfaatkan informasi pada Matriks Realisasi Rencana Aksi, Matriks Informasi Kinerja, dan Matriks Nilai Capaian Kinerja Organisasi, sebagai acuan perbaikan perencanaan target kinerja, pengelolaan program dan kegiatan, serta peningkatan capaian kinerja organisasi di periode berikutnya;
 - 3) Agar meningkatkan kegiatan evaluasi internal guna mendorong pencapaian target yang lebih baik.
8. Inspektorat Wilayah III telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi APIP tahun sebelumnya, yaitu:
 - Memanfaatkan informasi pada Matriks Realisasi Rencana Aksi, Matriks Informasi Kinerja, dan Matriks Nilai Capaian Kinerja Organisasi, sebagai acuan perbaikan perencanaan target kinerja, pengelolaan program dan kegiatan, serta peningkatan capaian kinerja organisasi di periode berikutnya.

Bab II Gambaran Hasil Evaluasi

1. Hasil Evaluasi

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Wilayah III memperoleh nilai 79,40 atau dengan kategori penilaian **BB** (Sangat Baik). Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
A	Perencanaan Kinerja	30%	24,00
B	Pengukuran Kinerja	30%	21,90
C	Pelaporan Kinerja	15%	13,50
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		100%	79,40
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada level Satuan Kerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja Kementerian Luar Negeri.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Wilayah III tahun 2022 sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Dari aspek keberadaan, Inspektorat Wilayah III telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra Tahun 2020 - 2024) dan jangka pendek/tahunan (Renja tahun 2022 dan 2023). Rencana kinerja tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 dan 2023 yang memuat sasaran strategis dan target kinerja yang akan dicapai pada masing - masing Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

Sementara itu dari aspek kualitas, perencanaan kinerja Inspektorat Wilayah III telah memadai dan memenuhi sebagian besar seluruh kriteria penilaian. Akan tetapi dari aspek pemanfaatan, dokumen perencanaan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan penyusunan perencanaan secara berkesimbangan.

Beberapa hal penting yang mendukung pencapaian kinerja pada komponen Perencanaan kinerja, diantaranya:

- Dokumen perencanaan kinerja tahun 2022 telah diformalkan;

- IKU telah memenuhi kriteria SMART;
- Dokumen perencanaan telah selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan juga hingga tingkat individu
- Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan Inspektorat Wilayah III terkait dengan aspek perencanaan kinerja, di antaranya sebagai berikut:

- Belum terdapat implementasi atas konsep pohon kinerja (pohon kinerja masih baru disusun dan berupa konsep pada tahun 2023).

B. Pengukuran Kinerja

Inspektorat Wilayah III telah melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan sasaran strategis dan target kinerja yang akan dicapai. Selain itu pengukuran kinerja juga telah dilengkapi dengan manual IKU yang didalamnya juga menjelaskan definisi operasional dan mekanisme pengumpulan data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan pada tingkat satuan kerja.

Pengukuran Kinerja juga telah menjadi kebutuhan organisasi dalam mewujudkan pengelolaan kinerja secara efektif dan efisien secara berjenjang dan berkelanjutan. Di samping itu pimpinan unit kerja selalu terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengukuran capaian kinerja dan telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

Beberapa hal penting yang mendukung pencapaian kinerja pada komponen pengukuran kinerja, diantaranya:

- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan menggunakan Matriks Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO);

C. Pelaporan Kinerja

Inspektorat Wilayah III telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 pada tingkat satuan kerja. Laporan kinerja telah mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja dan telah diformalkan dan dipublikasikan melalui website Kementerian. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Beberapa hal penting yang mendukung pencapaian kinerja pada komponen pelaporan kinerja, diantaranya:

- Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu;
- Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas serta menampilkan informasi sesuai dengan data dukung;

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum terdapat informasi terkait sumber data dukung capaian kinerja pada LKj;
- Kepedulian setiap pegawai terhadap Laporan Kinerja masih perlu ditingkatkan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Manajer Kinerja Organisasi Inspektorat Wilayah III telah melakukan evaluasi internal pada unit kerjanya. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan memperhatikan langkah-langkah monitoring evaluasi terkait pengelolaan kinerja dan telah melibatkan seluruh pimpinan dan sebagian besar staf pada Unit Organisasi. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah III dan sebagian besar rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Belum seluruh hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti;
- Inspektorat Wilayah III belum melakukan tindak lanjut dialog kinerja dalam langkah nyata, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kinerja;

2. Rekomendasi

Dalam upaya perbaikan pengelolaan kinerja dan penilaian evaluasi AKIP pada Inspektorat Wilayah III, kami memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Agar mengimplementasikan atas rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan pada dialog kinerja sebagai upaya percepatan dalam peningkatan kinerja satuan kerja;
- b. Agar menambahkan informasi terkait sumber data dukung capaian kinerja pada LKj tahun berikutnya;
- c. Agar memperhatikan penetapan target IKU sehingga capaiannya tidak melebihi 120%.

Bab III

Penutup

Inspektorat Wilayah III telah menerapkan Sistem AKIP dengan baik dan telah menyusun dokumen kinerja secara baik sesuai dengan ketentuan. Selain itu dokumen dimaksud telah disampaikan kepada Pusat tepat waktu dan mempublikasikannya di *website* Kemenlu sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan kinerja di Inspektorat Wilayah III. Laporan Kinerja telah disajikan dengan informasi dan data dukung yang memadai. Namun, Penyajian informasi kinerja agar memperhatikan kembali pedoman penyusunan LKj dalam Permenlu Nomor 4 Tahun 2018. Inspektorat Wilayah III juga kiranya dapat terus memperbaiki mekanisme evaluasi internal dengan memperhatikan perkembangan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya dan perkembangan situasi internal dan eksternal, agar capaian kinerja di tahun mendatang dapat lebih baik.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas upaya Pimpinan Inspektorat Wilayah III dalam menerapkan Sistem AKIP sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian Luar Negeri RI.

Atas rekomendasi yang disampaikan, Inspektorat Wilayah III agar menindaklanjuti dan menyampaikan progressnya paling lambat 1 November 2023.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2022

Inspektur Wilayah III



Lanang Seputro

NIP. 19680107 199303 1 011

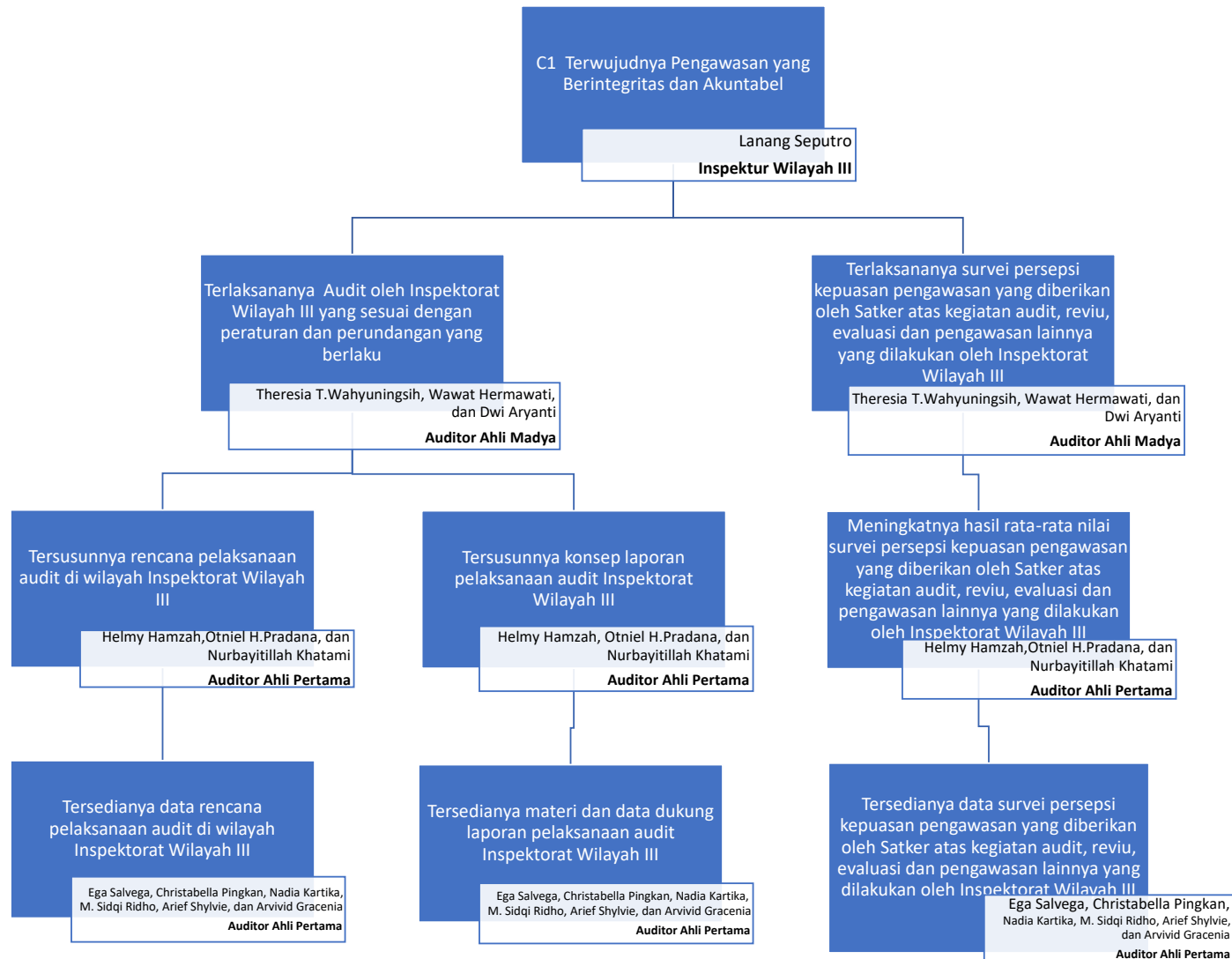
Tembusan kepada :

1. Yth. Inspektur Jenderal (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Jenderal;
3. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

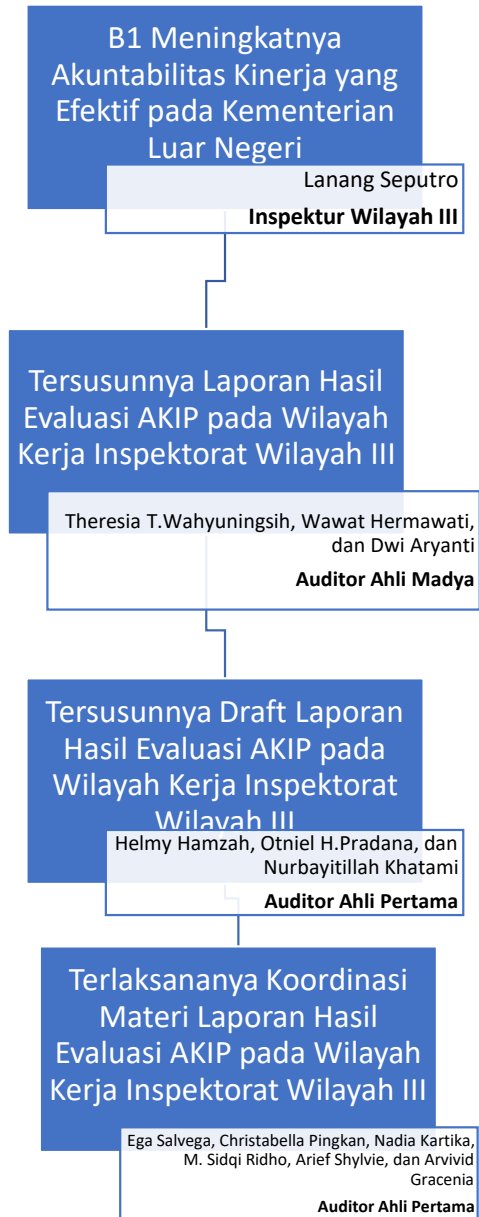
LAMPIRAN IV

MATRIKS PENJENJANGAN KINERJA

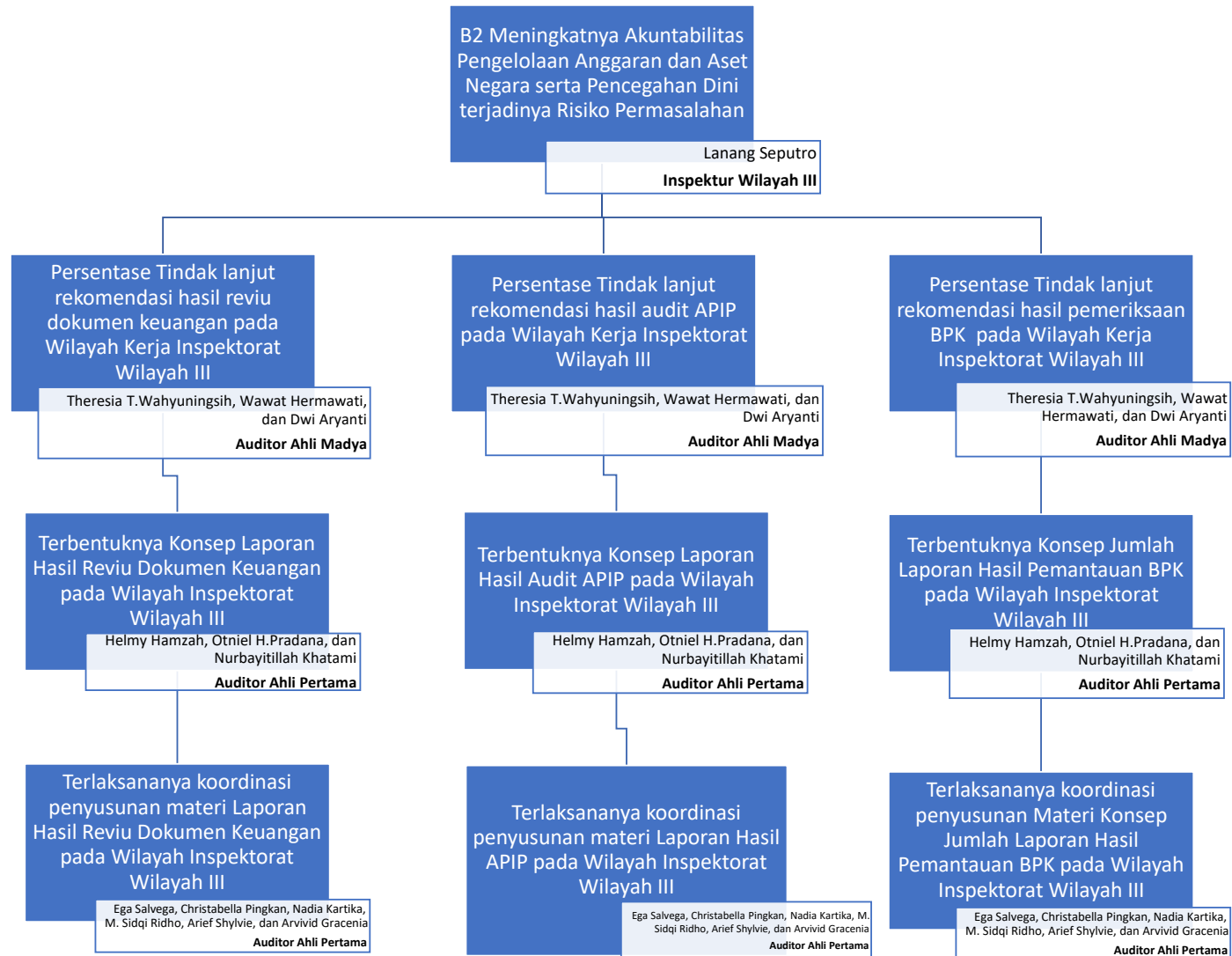
Penjenjangan Kinerja - Sasaran C1



Penjenjangan Kinerja - Sasaran B1



Penjenjangan Kinerja - Sasaran B2



Penjenjangan Kinerja - Sasaran L1

